



**RISALAH RAPAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	:	2014 – 2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke-	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 27 Januari 2015
Pukul	:	14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK. III
Ketua Rapat	:	Rambe Kamarul Zaman / Ketua Komisi II DPR RI
Acara	:	Membahas Struktur dan arah kebijakan Penataan IPDN
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. Anggota Komisi II DPR RI: 37 dari 50 orang Anggota dengan rincian :

PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
7. DIAH PITALOKA, S.sos
8. Ir. TAGORE ABUBAKAR
9. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
10. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
11. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH
12. Drs. SIRMADJI, M.Pd

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR)

13. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
14. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
15. TABRANI MAAMUN
16. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

17. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
18. H. SUBARNA, SE.,M.Si
19. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

N MUSTOFA, M.Si.

ULKIFLI ANWAR

22. Ir. FANDI UTOMO
23. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH
24. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

25. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.

26. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

27. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si

28. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

29. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.

30. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

31. H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI

32. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

33. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH

34. Drs. TAMANURI, MM

35. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

36. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH

37. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah:

- Rektor IPDN (DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati saudara Rektor IPDN beserta jajarannya.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan anggota Komisi II yang berbahagia.

Kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Rektor Institusi Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afita.

at yang menandatangani 20 anggota dari 50 orang anggota. dimana tata tertib 251 ayat (1) rapat ini sah dan korum, dan him rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kita sekalian, dan sehabis acara yang lalu langsung kita lakukan tindak lanjut mendalami hal struktur dan kebijakan istitusi pemerintahan dalam negeri, sewaktu rapat Pimpinan dengan kapoksi ini dan dari sekretariat mengatakan kenapa kita harus utamakan IPDN kan masih banyak Ketua, rupanya kapoksi ini banyak yang mantan IPDN, karena kebersamaan Komisi II kita laksanakan. Jadi alumni IPDN dan mantan dosen IPDN, bukan saja jadi camat tapi ada juga yang sudah menjadi bupati, dan ini merupakan kemajuan bagi IPDN, tapi perlu untuk ditata lebih lanjut, oleh karena itu rapat kita dan dari Pimpinan akan menyampaikan pikiran dari Pak Lukman Edy akan menyampaikan, Pak Wahidin juga gitu, dan kita punya pengalaman sendiri, karenanya yang akan dijelaskan nanti adalah hal yang menyangkut bagaimana IPDN mengimplementasikan visi dan misi dalam menjalankan kepomongprajaan yang mengembangkan sistem tritunggal terpusat, saya kira penting.

Saya mau cerita saja, waktu camat itu datang ke kampung, itu dengan rela rakyat memotong kambing, apa, seluruhnya rakyat, jadi kalau orang tua saya bukan sekolah APDN ada dulu namanya struktur kepala dewan negeri, dibawah camat ya ada, dan untuk menduduki itu harus memang kepala adat, jadi yang terhormat waktu itu kalau bisa jadi camat, kamu mau jadi sekolah camat tidak, tidak tahu berapa tahun itu, kalau jadi sekolah camat itu sudah hebat, jadi mungkin akan disampaikan oleh rektor IPDN.

Berikutnya untuk arah kebijakan IPDN, bagaimana ceramah saudara Menteri Dalam Negeri bahwa IPDN menjadi catra dimuka untuk melakukan revolusi mental, dalam menjadikan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang terpecah dalam pembentukan perilaku kepomongan dan penyedia kader pemerintahan terampil sesuai visi yang diemban IPDN.

Yang ketiga, terlalu banyak soalnya dan setidaknya kita nanti perbincangkan. Bagaimana bentuk pola pendidikan yang selama ini dijalankan, kalau para alumni mungkin sudah paham betul, tapi dengan perubahan seperti itu saya kira jika kaitannya dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.

Yang keempat bagaimana proses perkembangan IPDN di beberapa daerah, dan kita dengar dan ketahui, IPDN sudah ada terpusat dan suah ada diberbagai daerah, kalau di Sumatera itu ada di Pekan Baru, Rokan Hilir, ada di kampungnya Pak Tabrani, di Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada, NTB juga ada, dan sudah ada sekolah ini, oleh karena itu mungkin nanti disampaikan oleh saudara rektor IPDN perkembangan di beberapa daerah yang telah dibentuk dan sistem pendidikan dan pengajarannya termasuk pelatihan dan pengasuhannya. Dan kesimpulannya nanti Komisi II akan mengunjungi spesifik pada masa sidang ini ke daerah yang dimaksud.

Yang kelima adalah ini soal penerapan sanksi, dalam sistem pendidikan IPDN, dari mulai awal penerimaan juga modelnya begitu, kita hendaknya IPDN otonom dalam menyelenggarakan pendidikan, dan karena uu sistem pendidikan nasional menyatakan hal yang khusus dapat dilaksanakan oleh pendidikan itu, aparatur.

Yang keenam, komisi II ingin mendapat penjelasan terkait pola pengasuhan, jika ada pertanahan yang khusus menyangkut ini sampai pelisirannya sebab saya kira soal IPDN terbuka oleh khalayak ramai juga, apakah itu efektif atau tidak.

Terakhir bagaimana upaya menciptakan kader pemimpin masa depan jika kita lihat dari jumlah pengasuh dan para pengajar yang ada, itu yang kami sampaikan karena rektor IPDN sudah kita kenal semua karena pada waktu acara RDP pada waktu itu sudah kita memperkenalkan diri masing-masing,

ajar Diantoro, jadi ada peranakan NKRI disitu, dari Kepulauan
menjadi rektor.
lakukan kita sepakat jam 17.30 kita akhiri ya?

(RAPAT : SETUJU)

Oleh karenanya saudara rektor (rekaman tidak dilanjutkan).

F-PAN (H. SUKIMAN, S.PD., M.M.):

Interupsi Pimpinan.

Alangkah baiknya materi yang disampaikan juga kita bisa terima sebagai bahan untuk kita baca.

KETUA RAPAT :

Oke, karena ini masih berjalan, dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan sampai di tangan kita. Sebab terkait nanti tanggal 6,7,8 itu kita karena IPDN anggaran dari APBN termasuk salah satu pengantar kita, kita lakukan pembahasan menyangkut anggaran.

Kami persilakan saudara Rektor IPDN untuk menyampaikan hal-hal agar dialognya bisa kita lakukan, kami persilakan.

REKTOR IPDN (Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kami hormati Ketua Komisi II dan bapak wakil Ketua.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi II.

Seperti yang digambarkan Ketua tadi, yang sebagian besar juga sangat dekat dengan kampus kami, Pak Mangindaan waktu Menpan adalah pembina kehormatan kita, dan juga alumni beberapa bisa berkumpul disini. IPDN seperti yang disampaikan Ketua mempunyai misi menjadi lembaga tinggi dalam mengemban tugas pengembangan ilmu pembentukan kepamongan dan penyedia kader yang terampil dengan sejumlah misi.

Tujuan pendidikan, membentuk pamong praja yang memiliki kemampuan 3 kompetensi, kemampuan mengelola kebinekaan sebagai kekuatan bangsa dan melestarikan kesatuan bangsa, itu bagaimana IPDN mampu mengelola suku dan sebagainya, kemampuan berfungsi sebagai diligen, mengelola fungsi dan tugas berbeda untuk kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dalam satuan kerja yang berbeda, itu tercantum dala Permendagri, maka selama pendidikan anak-anak kita upayakan mempunyai 3 kemampn utama :

1. kemampuan georitik, kita berharap alumni sekolah ini mempunyai kemampuan georitik yang sama dengan rekan-rekan di perguruan tinggi lain, yang sekolah di jurusan ilmu pemerintahan.

uan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku
n berpemerintahan dari kelurahan dan desa sampai pusat, ini

3. kemampuan empirik yaitu menguasai fakta lapangan tentang praktek pemerintahan. Kemampuan yang ketiga ini yang membedakan alumni IPDN dengan alumni sekolah lain, di tes dengan cara yang berbeda, didik dengan cara yang berbeda mahasiswa lain untuk mendapatkan 3 kemampuan lain.

Sebagai gambaran meningkatkan kembali IPDN Ini dulunya departemen dalam negeri pernah membentuk menengah tinggi pamong praja, kemudian dikembangkan menjadi sekolah menengah pegawai pemerintahan administrasi atas, dibuat di Jakarta dan Makassar, lalu tahun 1952 kemendagri menyelenggarakan kursus dinas C di kota Malang, itu cikal bakal dari APDN, tahun 1956 APDN didirikan di Malang dan diresmikan Presiden Soekarno, tahun 1967 didirikan disitu ...(suara tidak jelas) karena APDN menghasilkan sarjana muda, maka didirikan ilmu Pemerintahan, lalu dipindahkan ke Jakarta tahun 1972, jadi IIP yang di Cilandak sekarang itu berdiri tahun 1972 pindahan dari Malang. Lalu tahun 1988 setelah 1972 IPDN berdiri di semua provinsi, ada 20 APDN dari 26 provinsi, ada 6 sja yang idak APDN, tahun 1988 APDN disatukan menjadi APDN nasional, dan berkembang menjadi sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri tahun 1992, kemudian baru dijadikan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri 3A tahun 1992, tahun 2004 STPDN digabung dalam istitus pemerintahan bergabung menjadi IPDN, jadi digabungnya STPDN ke dalam institut ilmu pemerintahan pada tahun 2004 dan itu berdiri IPDN, kemudian tahun 2009 pemerintah memutuskan mendirikan kampus regional di daerah, kampusnya di Riau, Sulbar, Pontianak, NTB, kemudian Makassar, Manado dan Papua.

Waktu itu didirikan kampus regional agar jumlah mahasiswa tingkat II dan III tersebar di daerah untuk menambah wawasan nusantara, disamping mengurangi di kampus Jatinangor yang besar tahun 2009, kemudian gambaran IPDN ini kampus daerah hanya menyelenggarakan tingkat II dan III, jadi seluruh mahasiswa tingkat I berada di Jatinangor, kemudian Tingkat II dan III sebagian besar ada di 7 daerah, dan kemudian ada di kampus Cilandak untuk S1, kemudian setelah tingkat IV semua program D4 kembali ke Jatinangor.

Struktur organisasi, ini mohon maaf kalau terlalu kecil tulisannya, IPDN ini rektor saat ini saya, wakil rektor Prof. Dr. Hermaya, beliau ijin sekarang di kampus, di sebelah kiri saya pembantu rektor I bidang akademis Prof. Wirman Sarbi, pembantu rektor II bidang administrasi Dr. Irodi Musroa, Pak Firman dari Lampung, Pak Hiro dari Flores, Pak Irmaya dari Jawa Barat, kemudian pembantu rektor III mohon ijin ada di Jepang, itu dai Sulawesi Selatan, dan kepala biro perencanaan dan akademik Arif Efendi Jawa Tengah, Kepala Biro II ada di kampus, III ada Benhar bidang keprajaan dari Manado.

Saya didampingi rekan dari diklat Ibu Anti selama ini memfasilitasi penerimaan praja, dan beberapa rekan saya kepala bagian humas, kepala bagian umum ikut bersama saya, sedangkan di daerah mereka dinamakan regional kampus daerah, ini kondisi kampus daerah ada Direktur, kemudian ada pembantu Direktrir Bidang Akademik, bidang admnistrasi dan keprajaan, kemudian kepal bagian akademik, kepala bagian tata usaha, kepala bagian keprajaan. Itu struktur di kampus daerah.

Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua sistem pendidikan IPDN, seperti yang disampaikan untuk mendapatkan pengetahuan akademik dan praktis, pelatihan, untuk memperoleh kemahiran, pengembangan kepribadian, kepemimpinan komposisinya sudah kita perbaiki sekarang, pegajaran 40%, pelatihan 30%, pengasuhan 25%, ini berbeda dengan APDN nasional didirikan pengasuhannya di atas 50%.

Perlu kami kabarkan juga bahwa kampus IPDN mempunyai 2 fakultas yaitu politik pemerintahan dan fakultas manajemen pemerintahan, fakultas politik pemerintahan mempunyai 3 program study, dan fakultas manajemen pemerintahan mempunyai 7 program study, sedangkan

jumlah dosen kami 261 orang, 14 profesor, 64 rektor kepala, dan 120 pelatih dan 121 pengasuh, untuk kampus daerah apakah disamakan standarnya...(suara tidak jelas).

Sedangkan pola seleksi praja, ini anggaran barangkali kawan-kawan berpendapat terlalu banyak, saya kira begini, administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, dan setelah administrasi selesai di kirim ke provinsi yang lulus tes administrasi itu ditetapkan provinsi standar nilai yang 7 dan sebagainya, tes psikologi, integritas dan kejujuran, selama ini kami menggunakan Dinas Psikologi Angkatan Darat Bandung untuk melaksanakan tes psikologi sedangkan integritas dibuat oleh KPK, tesnya dilaksanakan serentak.

Kemudian untuk tes kesehatan, apabila mereka sudah lulus tes psikologi dan kejujuran, mereka memasuki tes kesehatan, tes kesehatan saat ini Gubernur, bekerjasama dengan rumah sakit angkatan darat, dan rumah sakit umum daerah, yang lulus kesehatan baru bisa masuk tes Samapta, ini dilaksanakan oleh Koremangun Polda setempat, setelah lulus sampai tes 4 baru anak-anak dites kompetensi dasar yang menggunakan sistem komputer, dan ini yang langsung diketahui siapa yang lulus dan tidak, ini sepenuhnya dilaksanakan kementerian aparatatur negara, dan dikendalikan oleh badan kepegawaian negara, ini juga untuk menjawab pertanyaan selama ini untuk lulus sebagai PNS harus lulus tes dekade, untuk itu kementerian dalam negeri menyerahkan ters tertulis ini kepada Menpan yang lulus IPDN dan bisa dianggap lulus tes PNS. Setelah mereka lulus tes ini, mereka dipanggil ke kampus Jatinangor untuk tes patukir ini telah selesai dan mereka sah menjadi praja IPDN. Dan latihan oertama yang kami berikan adalah latihan mental, disiplin pelajar bekerjasama dengan resimen di Jawa Barat.

Jumlah praja kami saat ini 7471 orang ini berada di kampus Jatinangor 4767 orang, kalau pertanyaan Pak Asikin menanyakan, pagi untuk makan 7471, siang masak lagi, sore masak lagi, bagaimana mengawinkan anak 3 kali, jadi kalau ada waktu senggang silakan mampir ke Jatinangor untuk ikut makan, jadi kalau ada sms mengatakan makannya agak bosan ya bagaimana ya ramai, jadi wajar kalau sedikit bosan. Mahasiswa ini tersebar di kampus daerah 2286, 418 ada di kampus Jatinangor eh Cilandak, jadi yang berada di Jatinangor adalah 4767 orang, 4748 D4 sedangkan S1 masih di Jatinangor 219 orangnya.

Pola penyebaran, tadi saya gambarkan seluruh mahasiswa tingkat I dan II ada di Jatinangor, mahasiswa tingkat II madya praja itu sebagian besar di 7 kampus daerah, sedangkan S1 masih berada di Jatinangor begitu memasuki semester 5 mahasiswa S1 dipindahkan ke Jakarta, di Cilandak, dan mahasiswa D4 semuanya kembali ke Jatinangor. Dan nantinya dilantik oleh pak Presiden sebagai alumni pamong praja muda.

Seperti yang dikatakan tadi pamong praja mempunyai 3 kompetensi, kompetensi teoritik, empirik, legalistik. 144 SKS untuk D4, 158 SKS untuk s1, setiap tahun mereka ada praktek lapangan kemudian mereka mendapatkan 28 SKS pelatihan, pengasuhannya di luar jam, jadi bangun pagi anak-anak 04.30 Wib sudah bangun, selesai sholat subuh erobik ½ jam, 5.30 sudah kembali ke kamar, dan pukul 06.30 sudah makan, 07.00 sudah apel, 07.30 sudah di kelas, 13.30 sudah pelatihan, waktu mandiri mereka dari ashur sampai magrib, habis makan pukul 19.00 wajib belajar, satu jam istirahat dan pukul 22.00 tidur terus seperti itu, jadi di luar belajar dan pelatihan mereka dapat pengasuhan. Jadi semua anak-anak kita misalnya mahasiswa tingkat I tahun lalu praktek lapangan di Ciamis, 2000 orang, 2 tahun yang lalu di Bantul. Jadi setiap tahun terus mahasiswa kita sepanjang semester pelatihan kemudian dia praktek diakhir semester genap.

Bidang pengasuhan, pola pengasuhan selama 2 tahun ini kita sudah canangkan humanis, dinamis dan kemitraan, ini kami berusaha menekan kekerasan sampai titik 0, jadi hampir 1 tahun terakhir ini tidak ada kekerasan di kampus kita, walaupun terjadi kehilafan mereka berkelahi ya bisa kita kembalikan, jadi humanis, dinamis dan kemitraan, jadi kami canangkan kepada pengasuh agar memperlakukan anak-anak sebagai anak sendiri, atau anggap lah sebagai adik, atau teman, jadi dia bisa menjadikan praja itu sebagai sistem kemitraan.

kampus, olahraga fasilitas nanti akan saya lihatkan, kesenian, organisasi di kampus, kalau di universitas lain di kenal dengan jadi Ketua senatnya kami namakan Gubernur, dan wakilnya kami namakan Wakil Gubernur, Jadi biar berangan-angan jadi Gubernur.

Gambaran alumni kita ini totalnya 19.154 termasuk beberapa senior yang ada disini yang sekarang sedang menduduki jabatan politik ada 79 orang, kemudian pejabat eselon itu sampai Sekda ada 7000 lebih, kepala seksi di pemerintahan atau camat, kepala bagian di kantor bupati itu sebagai pemerintahan itu rata-rata dari kita.

Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan ini gambaran pembangunan kampus di semua kampus daerah kecuali kampus Kalimantan Barat, dan ini belum selesai dan masuk tahun ke 2, jadi ini masih meminjam gedungnya milik pemerintah provinsi... sampai gedungnya selesai 2-3 tahun lagi, dan penambahan sejumlah ruangan baru di kampus kami, baik di Ciracas dan Jatinangor.

Ini rencana pengembangan IPDN, Bapak-bapak yang saya hormati, pengembangan IPDN ini sebagai besar sudah kami masukan dalam statuta baru, mungkin kami akan menunggu saran dari bapak-bapak dan nantinya akan kita rapatkan kembali, misalnya kami berencana menambah satu statuta baru, kemudian di dalam statuta sejarah kepomongpraja itu kami masukan secara lengkap, kita laporkan juga saat ini kita sudah memasukan tahun ketiga program doktor, profesi kepomongprajaan juga kita bentuk dan tahun ini kita sudah menerima satu angkatan pertama, dan penataan kampus di daerah 7 kampus, lalu peningkatan unit penjamin mutu internal IPDN, penataan model revolusi mental bagi karyawan dan praja, karena ini modul baru bulan Februari akhir kita akan merencanakan kajian ini bersama juga Bapak menteri, dan akan mengundang pakar dari luar. Ini rekapitulasi anggaran tahun 2015, anggaran yang diberikan kepada kami 552.912.976.000 ini setelah dilakukan efisiensi dan sebagainya dan sesuai kebijakan baru. Awalnya itu 84642 sekarang 552.

Skala prioritas revisi Kemendagri tentang organisasi dan tata kerja penyusunan permendagri tentang pola karir alumni, penambahan fasilitas hukum dan pemerintahan, peningkatan status menjamin mutu, peningkatan unit penjamin mutu, pembentukan pusat kajian pemerintahan, kemudian penataan bidang akademis, bidang pelatihan dan penerimaan masukan dari Bapak-Bapak yang terhormat, pengembangan kualitas SDM, pembangunan sarana dan prasarana yang semakin sesuai dengan saran akademis, misalnya perpustakaan, perpustakaan kami memang belum terlalu besar jumlahnya, ke depan kami akan membangun perpustakaan yang besar.

Kendala-kendala dari berbagai aspek. Aspek kelembagaan, status IPDN di kementerian itu disebut UPT itu juga dalam perubahan struktur organisasi kemendagri, dan kami juga menyarankan agar itu di evaluasi, kami juga mohon pandangan dari Ketua, wakil Ketua dan anggota.

Begitu juga organisasi tata kerja IPDN masih perlu adanya ketataan untuk menghadapi tupoksi yang terus berkembang, ini aspek SDM, secara kuantitas berlebihan tapi mungkin kualitasnya masih perlu di tata seperti di kampus masih terlalu banyak sarjana hukum itu juga sudah kami lakukan perbaikan.

Jabatan fungsional juga akan kembangkan terus termasuk fungsional pengasuh, karena sekarang pengasuh belum tercatat jabatan fungsional, dan akan kami usahakan, sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar mutu pendidikan, seperti perpustakaan yang saya sebutkan tadi, permasalahan saat ini akreditasi masih B dan kami akan perjuangkan menjadi A, akreditasi prodi kami ada 3 masih C dan tahun ini akan kita saahkan minimal B. Ruang perpustakaan, pola karir pengasuh belum tertata, belum ada pola karir alumni atau lulusan.

Kemudian pengembangan kerjasama IPDN ada dalam negeri dan juga luar negeri, bekerja sama dengan luar negeri ini kami menyiapkan bilingual, dan kami laporkan ada 5 kelas bilingual, lebih kurang 150 praja yang kegiatan sehari-harinya adalah bahasa Inggris, jadi mereka belajar bahasa inggris dan mereka tinggal di asrama berbahasa inggris, dan nantinya disiapkan untuk di sekolahkan

dengan beberapa universitas, seperti Thailand, mahasiswa itu
ada juga pernah tinggal di kampus kita.
pembicara di UM pada saat mereka seminar internasional, yang
makalahnya memenuhi syarat sebagai pembicara, dan tahun kemarin juga ujian laporan akhir dari
kelas bilingual sudah bahasa Inggris, dan mengundang penguji dari luar termasuk UI. Ini barangkali
yang dapat kami gambarkan, dan meweakili kondisi lapangan untuk dipahami, dan ini kondisi kampus
IPDN, garis merah ini bakal diambil sebagai jalan tol, tanah kita 280 ha, nanti akan diambil jalan tol
lebih kurang 46 ha, dan ini berdekatan dengan lokasi ITB dan UNPAD.

Di Jatinangor, ini kondisi ruang kelas, ini balai room, asramanya 2 tingkat, 1 lantai untuk 50
orang, dan atas 50, tapi kondisi sekarang memang ada yang lebih dari 50. ini kondisi tempat tidur untuk
tingkat 1, karena jumlahnya lebih dari 50, ini serambi depan, ini ruang belajar di asrama, ini lemari
pakaian di asrama, kamar mandi, untuk kamar mandi kami mohon ijin tidak pakai pintu jadi kita pakai
horden saja, karena kalau pakai pintu mandinya terlalu lama, jadi tidak dikasih pintu supaya mandinya
cepat, itu, ini ruang makan, lapangan upacara, poliklinik, kita punya poliklinik rawat inap, mesjid,
gereja, pura, gerejanya ada 2, ada lapangan olahraga stadion, ada kolam renang, lapangan parkir,
lapangan basket, ini ruang pelatihan, perumahan, jadi dosen di area perumahan juga, ini gudang, pos
keamanan cukup banyak, kendaraan kita yang baru ada 7 yang lain lama, di dalam ada kantin, jalan
khusus di kompleks, ATM bank BJB, koperasi IPDN, gedung pasca sarjana, jadi IPDN juga saat ini
diberikan mandat juga untuk program S2 dan program doktor, dan tambahan profesi pamong praja.

Demikian barangkali, terima kasih.

Suaranya kurang keras, "sesuai dengan visinya IPDN menjadi lembaga tinggi
kepamongprajaan terpercaya dalam mengemban tugas dan pengembangan perilaku kepamongan dan
penyedia kader pemerintahan yang trampil, IPDN mampu melahirkan sosok-sosok pegawai negara
yang akan menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia" "IPDN juga berhasil mencetak ribuan
kader pemerintahan yang sukses, IPDN is the best".

Baik, bapak Ketua, bapak-bapak yang saya hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan kami sangat merasa berterima kasih sekali, seperti apa
yang Pak Ketua sampaikan tadi bahwa Depdagri inilah yang pertama dibahas, dan mudah-mudahan
kami berharap dapat memberikan masukan, karena kampus ini, ini adalah milik bangsa Indonesia, milik
kita bersama, kami sangat mengharapkan dapat adanya saran perbaikan untuk kita semua, Terima
kasih.

Allohumawaiyan ajma'in Wassalamu'alaikum

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Rektor IPDN, ini ada sekedar mau mengingatkan saja di tahun 2007
Panja dibentuk. Waktu itu meninggal Delif Mutu, Ketua Komisi II pada waktu itu adalah Pak
Mangindaan ada di sebelah kanan, dan anggota Panja RUU Evaluasi tentang IPDN pada waktu itu dari
Komisi II, masih ada di Anggota Komisi II yang hadir pada saat itu adalah Saudara Mujib Rohmat, ada.
Tapi waktu itu dibentuk Panja karena ada soal-soal kekerasan, meninggal, apa, setelah itu tidak ada
pembentukan Panja lagi, mudah-mudahan ini juga nanti ya tidak usah kita bentuk Panja lah perkara-
perkara yang begini, tapi ya memang harus kita dalam lebih jauh, dalam konteks itu Saudara Rektor
IPDN, tadi sudah menjelaskan beberapa hal sampai pada soal posisi pendidikan tinggi. Ada penataan
Struktur termasuk jabatan fungsional, saya kira memang seluruh pendidikan tinggi sekarang, jadi
jangan kebanyakan Sarjana Hukum, tapi kalau Sarjana Hukum yang pandai Dosennya ya tidak juga
ada juga salahnya.

ini status struktur yang disampaikan di IPDN yang bagian dari li dalam penerimaan, bagaimana sejarahnya itu. KPK lembaga orang itu juga termasuk saya, saya kira kita akan juga pernah disampaikan, oleh karenanya karena ini waktunya juga tidak terlalu ya per fraksi kita berikanlah Fraksi kita berikan Anggotanya mengatur, kalau memang tidak ada komentar bisa dilimpahkan kepada anggota yang lain, ini hanya sekedar mengatur saja.

Kami persilakan dulu dari Fraksi PDI Perjuangan, ada Saudara Willy, langsung saja, nanti kalau ada yang menambahkan silakan diatur-atur, langsung.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY, M. YOSEPH, MM):

Terima kasih Ketua,

Yang kami hormati dan juga dari Rektor beserta seluruh jajaran IPDN, saya Willy M. Yoseph fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Pertama saya ingin menyampaikan satu pandangan mungkin kalau kita melihat apa yang telah di paparkan tadi bahwa IPDN ini sudah bagi kita Republik artinya merupakan satu sekolah kebanggaan kita, artinya ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri walaupun dalam sejarahnya ada juga artinya sesuatu yang akhir-akhir ini masih menyisakan tentang adanya kekerasan dan sebagainya, tetapi kita ingin melihat-hal-hal yang positif, dalam hal ini terutama alumni-alumni yang sudah lolos dari IPDN sejak berdiri dan memberi kontribusi yang banyak sekali untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Nah dari apa yang telah disampaikan ya dengan semua aktifitas dan rencana kedepan kemudian bahkan tadi kita melihat adanya kenaikan anggaran yang telah dipersiapkan untuk kedepan yaitu lebih dari 552 milyar ini, kita melihat satu anggaran yang bisa kita katakan cukup atau tidak cukup. Tapi kalau kita melihat dengan anggaran yang ada ini tentu masih banyak dibutuhkan pembenahan-pembenahan ya untuk mendapatkan kualitas yang baik dari IPDN ini. Nah kami tentu akan memberikan tanggapan atau saran, terutama yang tidak lepas itu adalah menyangkut masalah para dosen, kemudian pengasuh yang cukup menentukan suksesnya pendidikan ini, karena ini merupakan benang merah yang kita akui di semua pendidikan. Maka oleh karena itu alangkah baiknya yang menyangkut masalah sistem mungkin mereka yang mendapat tugas sebagai dosen yang sangat menentukan, yang memberikan ilmu yang luar biasa untuk anak-anak ini nanti, untuk meneruskan perjuangan bangsa ini, adalah orang-orang yang tentu juga punya latar belakang yang memadai artinya mereka yang sudah memenuhi syarat untuk itu.

Jadi kalau kita melihat dari apa yang ada ini yang saat ini ada banyak para pejabat-pejabat tinggi yang nota bene nya hampir mungkin pensiun, lalu mereka ditaruh ke IPDN ini ya otomatis ini akan memperpanjang pensiun, jadi akan memperpanjang pensiun dan tentu ini juga sesuatu hal yang harus dikritisi artinya sesuatu hal yang tidak harus memberikan sesuatu catatan dan juga seperti apa yang kita lihat bahwa mereka banyak duduk di truktural kampus, padahal kita melihat orang-orang sudah masuk masa pensiun yang diperpanjang karena memang kalau melaksanakan tugas di pendidikan itu bisanya itu diperpanjang. Artinya ini sesuatu hal yang juga harus diperhatikan mengingat ada banyak tenaga-tenaga di kampus harapan kita adalah mereka yang memang punya karier yang bisa kita katakan mereka memang dari awalnya memang sudah memahami, mengenal bahkan alumni-alumni lulusan yang terbaik seperti mungkin.

Nah yang kedua kami juga melihat bahwa adanya pembagian sekolah-sekolah di lokal atau di daerah yang tadinya seperti umpamanya di Kalimantan Barat, ada di Papua, ada di ini, kalau kita melihat ini masih kurang sebenarnya, mengingat kita ada 33 atau 34 provinsi. Maka oleh karena itu ini juga perlu dipikirkan untuk pengembang, untuk sistim tentang untuk tingkat I mereka di taruh Jatinanggor kemudian mereka akan disebarakan menurut kami ini memang satu upaya yang dulu kita melihat bahwa dulu kita melihat sistim senioritas yang cukup kita pahami, supaya tidak banyak masalah tentu ini juga sesuatu hal yang perlu kita dukung.

pendidikan yang ada di IDN ini sudah seperti saya katakan
ji kita, tinggal kita meminta adanya pembenahan-pembenahan
telah dipaparkan tadi tinggal artinya nanti DPR memberikan

dukungan tentu menyangkut masalah anggaran yang menurut hemat kami semakin cukup anggaran,
memadai anggaran itu tentu juga kualitas dari alumni IPDN ini akan lebih baik nantinya.

Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarrakatuh.

F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd):

Pak Ketua nyambung PDI tadi, masih PDI ya. Yang tua cuma yang muda kalah.

Langsung saja yang terhormat Pimpinan terutama Pak Ketua, dan Bapak Rektor dan seluruh
jajaran, saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh kawan saya tadi, yang pertama adalah
terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua yang pernah ada sekian tahun yang lalu dilakukan
pembentukan Panja terkait dengan "insiden" artinya peristiwa yang sangat mengecewakan tapi
alhamdulillah sekarang relatif tidak terdengar lagi. Barangkali ada langkah-langkah yang sifatnya
signifikan sekali untuk disampaikan kepada kita sehingga kedepannya bisa kita sempurnakan lagi, itu
yang pertama.

Yang kedua dari seluruh paparan dan juga dokumen yang disampaikan, saya menangkap
bahwa IPDN ini akan mengalami proses pergeseran menjadi perguruan tinggi dalam konteks university
atau apa yang arahnya adalah pengembangan kepada salah satu cabang atau bidang yang muat,
disitu tampak sekali munculnya rencana untuk misalnya membuka program doktor, nah saya usul agar
itu dikaji kembali, trend ke arah IPDN menjadi University, menurut saya IPDN dipertahankanlah
menjadi sebuah pendidikan tinggi yang spesifik untuk membangun seperti yang ada di dalam visinya
itu "Kepamongprajaan terpercaya". Jadi fokus yang untuk ilmu-ilmu apakah itu pemerintahan, Politik
pemerintahan, tata pemerintahan, biar yang lain itu diurus oleh perguruan tinggi yang sudah punya
tradisi university, dan itu untuk IPDN tidak akan turun martabat oleh karena tanggung jawab dan sekian
kabupaten itu akan sangat menantang. Tanggung jawab bapak ibu sekalian dalam rangka
pengembangan untuk menjadikan IPDN sebagai pendidikan tinggi kepomongprajaan yang terpercaya,
bukan hanya bahkan tadi saya baca dengan perkembangan itu bukan hanya untuk Indonesia tetapi
sudah kerjasama tukar menukar siswa dan lain sebagainya dengan tetangga, apalagi sekarang kita
sudah memasuki era MEA, siapa tahu kedepan Indonesia yang menguasai 43 persen pasar MEA
sesungguhnya manusianya, wilayahnya juga sedemikian rupa itu juga menjadi garda terdepan dalam
pendidikan kepomongprajaan yang benar-benar profesional, terima kasih Pak Rektor.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak budiman dulu, lanjut silakan.

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil):

Cuma satu Pak pimpinan ...(suara tidak jelas) sudah lama saya bayangkan kampus ini bisa
berperan ...(suara tidak jelas) alumnus-alumnusnya enak, dimana alumnus-alumnusnya bukan sekedar
dokumen ini, tetapi juga dimungkinkan untuk memasuki politisi, jabatan politik maka dimungkinkan
.....(suara tidak jelas tanpa mic) politisi yang kualifikasinya menurut saya ...(suara tidak jelas) lagi.
Untuk kebutuhan pamong praja tingkat daerah bisa saja ini diserahkan kepada daerah-daerah ...(suara

...bluk yang ...(suara tidak jelas) di birokrasi agar dia memenuhi
Jadi kira-kira IPDN Pusat itu adalah ...(suara tidak jelas) yang
...(suara tidak jelas) untuk menghadapi situasi globalisasi. Dengan
...(suara tidak jelas) dan standarnya adalah standart yang tinggi.

KETUA RAPAT:

Nah mic sudah hidup apa Pak Henry mau menambah lagi?

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH):

Ya terima kasih, kalau saya lihat tahapan pembinaan pengasuhan Praja dilakukan dengan 3 pendekatan, kemudian terakhir ada kekerasan dilingkungan itu tahun 2007. Pertanyaan saya apakah memang tidak ada kekerasan lagi? atau Ada tapi tidak terungkap? Tidak mencuat seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau memang sudah tidak ada lagi apakah karena ada perubahan tentang pola atau pendekatan terhadap para Praja ini. Karena saya mengalami dalam hal ini saya pernah menjadi pembela di persidangan ketika saya masih menjadi advokat ada 2 kali peristiwa. Pada umumnya atau setiap peristiwa itu dilakukan oleh senior artinya mereka yang sudah mengikuti pendidikan bertahun-tahun tapi masih melakukan kekerasan. Bahkan ketika itu Akademi Kepolisian, Akademi Militer dan sebagainya tidak ada lagi tapi justru IPDN masih terjadi kekerasan-kekerasan.

Kalau pola pendekatan ini memang sejak sebelum 2007 artinya ada apa kok belakangan ini masih dengan pola pendekatan yang sama kok sudah tidak ada kekerasan, atau memang pola ini baru ditemukan kemudian saya melihat ketika ada paparan bahwa ada satu pelatihan semacam keselamatan yang dilakukan oleh TNI, saya tidak melihat urgensinya untuk mencapai tujuan dari IPDN. Coba kita perhatikan tujuannya adalah untuk menciptakan segala macam itu kan tadi tidak ada urgensinya pelatihan-pelatihan kekerasan seperti itu. Karena dampaknya juga yang kita lihat melahirkan para yang tamatan dari IPDN ini ketika lulus, ketika terjun ke masyarakat gayanya bukan gaya sipil, tapi lebih kentara dari Kopasus begitu. Dari pakaiannya, dan tidak mencerminkan pamong, di situ jelas keprajaan, kepamongprajaan, kalau menurut pemahaman saya namanya Pamong itu, artinya ngemong, melindungi, melayani, tapi karakter yang terlihat di beberapa tempat justru karakter dari calon pemimpin yang ingin di layani, nah ini kami mohon sedikit penjelasan dari pihak IPDN.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh'alaikum.

Kami lanjutkan dari Partai Golkar kalau ada. Ada ya? Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Kami langsung pada pertanyaan melihat paparan tadi kami punya pemikiran IPDN ini adalah pabriknya Birokrat kami akan kolaborasi dengan Pak Budiman Sudjatmiko sebelum dilakukan pembagian pola pendidikan untuk menyediakan Birokrat di tingkat daerah maupun di tingkat Pusat, kami ingin mengetahui rasio kecukupan seorang pegawai negeri melayani masyarakat ini satu

nia pendidikan tingkat dasar, menengah, maupun atas. Disana
nya 1:20 begitu. Nah pertanyaannya terkait dengan hal ini
paian kelulusan ini sudah memenuhi target yang diharapkan.

Kemudian terkait dengan kurikulum ajar, tadi ada dibagi menjadi 3 diantaranya pola asuh dan
juga diarahkan pada persoalan-persoalan empirik, sejauhmana tingkat keberhasilan penerapan
kurikulum ini karena maaf seperti Pak Dadang dan teman-teman yang lain anggota Komisi II yang
kebetulan pernah menjadi user di pemerintahan daerah, kami belum melihat bahwa alumni ini belum
semuanya maksimal. Utamanya adalah didalam rangka merespon persoalan-persoalan aktual di
tingkat pemerintahan daerah, pemahaman terhadap aturan-aturan yang baru misalkan pada waktu itu
dana alokasi desa. Ketika ditanya ditail masalahnya bahkan aturannya sendiri belum tahu kalau tidak
salah sekitar angkatan 13 kesini pak, padahal itu kan baru.

Kemudian tadi sudah disampaikan juga kondisi Perguruan Tinggi tersebut dengan segala
fasilitasnya. Pertanyaan berikutnya tentang tenaga ajar. Apakah juga disana diberlakukan sistem
sertifikasi seperti halnya tenaga pendidikan yang lain, karena kita tahu bahwa pola sertifikasi ini
kemampuan itu selalu diasah dan ditingkat.

Saya rasa ini dulu pak dan mudah-mudahan dalam kunjungan kita nanti ke STPDN nanti bisa
mendapatkan gambaran kira-kira kalau toh mau dibangun lagi saya dengar kemarin kalau tidak salah
di Manado atau di mana itu kira-kira bisa mencukupi tidak? Dengan kebutuhan yang ada di tengah-
tengah masyarakat. Terima kasih dari kami.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan.

F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Tambahan sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Kita saling mengisi seperti tadi ditambahkan oleh Pak Agung, jadi pengalaman kita menjadi
Bupati itu ini tentang kualitas ya? mungkin karena soal pola penempatan pegawai yang tidak seragam,
dimana dulu tapi, kalau sekarang mungkin sudah berbeda, karena sekarang, dulu orang menjadi
Camat sampai 10 tahun, 8 tahun dan semuanya lulusan IPDN, inginnya menjadi camat terus-menerus,
nah sehingga kalau kita bertemu dengan suatu Forum ilmiah katakan membuat suatu kajian atau
membuat suatu makalah itu mesti ketinggalan ilmunya ini, jadi banyak kita gunakan kalau kita
membentuk satu Tim kajian mesti yang kita ambil dari sekolah luar karena tadi, mungkin karena sistem
tadi kurikulum yang ada kurang pembekalan atau saking banyaknya tadi, cara belajar siswa aktif atau
mahasiswa aktif sehingga mereka itu diharapkan berkembang sendiri tapi kenyataannya di lapangan
kalau diadu soal pemikiran yang bersifat ilmiah itu kita ketinggalan. Mesti saya ngambilnya yang dari
Unpad dari mana, ini jujur saya katakan.

Jadi untuk itu tentunya ini yang perlu nanti kurikulum itu dilihat. Karena saya lihat tadi ini pola
pelajaran yang tiada hentinya, pengalaman kita di kelasnya ngantuk begitu. Dari jam sekian sampai
sore belajar terus, sehingga akhirnya apa saat menerima pelajaran dia tidur, itu yang pertama.

annya cuma berapa pak? Indek 1 tahun untuk mendidik praja dengan pokok operasional pendidikan kan itu dulu yang menjadi, 500 milyar ternyata kalau kita conver banyaknya pada pembangunan proyek atau pembangunan atau pembangunan apa? Tapi kita lihat ini indek perorangan kan ada standarnya itu, untuk satu praja satu tahun adalah berapa ratus juta atau berapa puluh juta ini tentunya saya cuma ingin tahu.

Kalau tadi dikatakan oleh Pak Yoso bahwa pola pengasuhan yang menimbulkan ya sebetulnya sekarang Pak Yoso di Tentaranya sudah tidak ada, kalau kita lihat LSM saja sekarang lebih gaya LMS di detasemen ini, detasemen ini gaya, gaya militer, justru militernya tidak ada, tetapi dulu saya adalah korban pertama, ini terus terang saja, dulu juga terjadi bahwa taruna itu sampai sekali masa transisi, masa orientasi itu 4 meninggal karena kerasnya senior ini, nah pada saat saya itu tahun 1975 itu dicelentik saja turun tingkat, akhirnya tidak ada yang berani, itu karena kebetulan pada saat itu adalah salah satu tarunanya adalah calon menantunya Gubernur. Sehingga saya termasuk taruna yang paling dimanja ketahuan saja memberikan hukuman push up berlebihan itu langsung turun tingkat si praja yang senior ini atau Praja yang senior ini.

Jadi tentunya ini nanti dilihat pola-pola pengasuhan yang didelegasikan pada Praja senior, terjadinya katakan kasus-kasus ini adalah terjadi pada jam-jam tertentu yang diberikan pola pengasuhan itu kepada organisasi praja yang ada. Mungkin itu saja pak tambahan dari kami, mudah-mudahan sih dan sekarang lemahnya di pemerintahan, lulusan IPDN itu tidak ditempatkan jadi camat, kalau kemarin yang cerita para Bupati, itu malah sekolah perawat jadi camat, sekolah ini jadi camat, ini juga referensi birokrasi yang seperti ini juga banyak yang dari IPDN. Tapi saya dulu karena sama-sama merasakan tadi menjadi taruna, saya tidak pernah menjadi bupati 2 kali, camat adalah IPDN, diluar IPDN saya keluarkan dari camat, selama saya 2 periode menjadi bupati seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Partai Gerindra, ya Pak Azikin saja.

F-GERINDRA (Dr. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi II yang saya hormati, Rektor IPDN beserta rombongan yang sangat saya hormati.

Berbicara masalah IPDN saya tentu teringat, saya alumni IPDN tahun 1977 dan saya katakan tidak ada satupun jenjang jabatan mulai dari Kamawilhansip, Kepala Desa, sampai Eselon II di tingkat Provinsi saya dapat, sampai bupati, sampai Sekda, yang saya tidak berhasil, tidak bisa mencapai Eselon I/a, oleh sebab itu saya tumpahkan saya punya emosi mengajar pendidikan dan saya menjadi pengajar di beberapa Perguruan Tinggi swasta dan negeri di Makasar. Bahkan pada saat saya menjabat sebagai Ketua Umum Assosiassi Bupati, tiap 3 bulan 1 kali saya diundang ke STPDN untuk memberikan kuliah umum dan sekaligus memberikan motifasi kepada anak-anak bahwa alumni IPDN bisa dan berhasil menjadi Ketua Umum Bupati seluruh Indonesia.

Bapak Pimpinan yang saya hormati.

Saya teringat tahun 1980, waktu ditawarkan kepada Pegawai Negeri untuk ditugaskan ke Timor Timur dan Irian Jaya tidak ada Pegawai Negeri yang siap kecuali alumni IPDN yang sudah mendapatkan latihan kemiliteran yang kita sebut Pacad (Perwira Cadangan). Tidak ada satu orangpun

r, bahkan teman-teman saya angkatan 77 itu yang ditugaskan a-kira jarak-jarak 10 meter tempat tinggalnya, sehingga saya STPDN yang memberikan pemahaman terhadap pentingnya disiplin dalam arti kata penyesuaian abtar aturan dan tindakan itu sangat penting. Walaupun saya sependapat dengan bapak-bapak kita bahwa jangan dia menjadi militer bahkan lebih militer dari pada militer, tapi patut untuk mengetahui dasar-dasar kemiliteran untuk mewaspada diri apabila ditugaskan ditempat-tempat yang rawan gangguan keamanannya, itu yang pertama.

Yang kedua Bapak Pimpinan kita ketahui bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini baru 3 Menteri Dalam Negeri yang menjabat Menteri Dalam Negeri dari partai Politik yaitu Syahrir dari Partai Sosial Indonesia, yang kedua Sukiman dari Partai Muslim Masyumi, dan sekarang Pak Cahyo Kumolo dari PDIP. Saya tahu betul bahwa Pak Cahyo Kumolo adalah seorang kader bangsa mulai dari masa Pemuda, memimpin KNPI sehingga kita harapkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Cahyo Komolo menjadi Mendagri ini dapat memberikan dorongan kepada STPDN untuk lebih meningkatkan dia punya kualitas sebagaimana masukan yang disampaikan kepada bapak dan teman-teman tadi, terutama sistem rekrutmen.

Saya tahu pak saya kawal, sampai sekarang ini saya masih ketua IKPTK Sulawesi Selatan. Itu ikatan alumni IPDN, saya kawal sejak dari awal bagaimana ketidakberesan ketidakberesan sistem penerimaan STPDN pada masa-masa yang lalu.

Alhamdulillah sekarang setelah dimasukkan KPK mungkin hal-hal yang selalu diperbincangkan oleh teman-teman alumni tidak terulang lagi, da kita harapkan kepada Rektor agar hal-hal ini jangan lagi terulang, saat sekarang.

Yang ketiga saya harapkan kepada Pak Rektor bahwa sistim pengembangan karier para pengasuh yang saya tahu betul bahwa 10 besar terbaik yang lulus STPDN itu ditahan untuk menjadi pengasuh di IPDN, saya melihat teman-teman itu sudah 3 kali berganti di Eselon II/a Kepala Dinas di daerah yang lain masih tinggal, saya tahu betul 05, 06, bahkan ada 04 mungkin yang masih tinggal, bahkan ada 02 yang masih tinggal, 01 masih ada ya? Ini mungkin perlu dibicarakan secara internal khususnya dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, agar jenjang karier para pengasuh itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dia ditempatkan di luar pendidikan setelah dia mengabdikan 10 tahun bahkan lebih 5 tahun. Kasihan kalau dia terus berputar sekitar kampus tidak akan mungkin dia bisa menikmati bagaiman nikmatnya sebagai seorang Birokrat yang ada di daerah. Di daerah kan banyak pemandangan pak, kalau di kampus kan pemandangannya di dalam kampus ya?

Yang ketiga sebagaimana disampaikan Pak Rektor bahwa kondisi makanan juga sudah bagus, mensa-mensa, masih mensa ya namanya? Mensa itu tempat makan namanya. Mensa karena informasi yang kami terima bahwa 2 tahun 3 tahun yang lalu kondisi mensa itu sangat tidak layak, artinya perbandingan antara energi yang dikeluarkan dengan jumlah makanan yang diterima itu tidak seimbang sehingga tidak mungkin kita akan menciptakan kader-kader pamong praja yang berkualitas.

Yang keempat yang terakhir, mungkin sistim pengawasanyang dilakukan oleh para senior kepada para mahasiswa, betul-betul lebih diperketat sehingga kondisi-kondisi yang bisa mencoreng nama baik diperguruan kita di lembaga IPDN ini tidak terulang lagi, antara lain batas yang tegas antara praja lelaki dengan praja wanita. Ini disamping kami sebagai anggota Komisi II juga mungkin isi kami sebagai seorang alumni yang membahasakan kepada Pak Rektor.

Terima kasih bapak Pimpinan, terima kasih.

Bilahirbissabillhaq Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan pak.

(BA):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Pak Rektor yang kami hormati melihat paparan tadi dan juga arah dan tujuan dan sebagainya tadi, bagus sekali dan juga kalau itu kita ibaratkan nanti Pimpinan-pimpinan di Indonesia seperti itu nantikan kita bisa mengharapkan Indonesia akan lebih baik nantinya dan tadi salah satunya Pak Azikin dan temen-teman yang lain itu adalah alumni dari IPDN dan berhasil. Pertanyaannya yang ingin saya sampaikan yang pertama dari lulusan yang hampir 20.000 ini alumni-alumni terpantau, dipantau oleh IPDN atau tidak? Dalam arti yang berhasil menduduki jabatan yang sampai Bupati dan sebagainya itu kira-kira berapa persen? Konon katanya dilapangan juga ditemukan bahwa alumni IPDN bekerja tidak sama dengan keahliannya, itu juga banyak juga, jadi ini untuk kita bahwa out put dari IPDN ini berjalan, ini yang pertama.

Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kalau tidak salah di sini tadi di dalam tes kebohongan dan tes-tes lain mengandung KPK dan memang hari-hari ini KPK lagi in ini, pertanyaannya adalah alasan mengapa mengandung KPK, karena kita tahu bahwa banyak persoalan-persoalan yang KPK belum terselesaikan atau tertunda ini konon katanya adalah tenaganya yang kurang. Tenaganya kurang di KPK sendiri, kalau nanti banyak instansi-instansi menggunakan KPK, otomatis KPK semakin berkurang lagi, biarlah KPK itu mengurus tentang korupsi dan sebagainya, tidak usah dikaitkan sebagai litsus disamakan dengan instansi lain mengeluarkan surat kelakuan baik, DASK dan lain sebagainya ini, alasannya kenapa gandeng KPK yang kerjanya sudah begitu banyak, hanya untuk ngurusi seperti ini.

Saya kira itu terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Fraksi Partai Demokrat, ada? Oh langsung Pak Mangindaan.

F-PD (EVERT ERENST MANGINDAAN, S.IP.):

Terima kasih, Mangindaan A-448 Partai Demokrat Dapil Sulawesi Utara. Setelah mendengarkan presentasi dari rektor, mulai dari apa itu IPDN sekarang sebagai satu perguruan tertinggi di bidang kepomongprajaan dari situ kami bertolak bahwa nalar berfikirnya sejak rekrut sampai dengan output saya lihat sudah banyak perubahan dibandingkan 2007 yang pada saat itu kami Komisi II mati-matian supaya pendidikan tertinggi yang kita dambakan itu bisa mengeluarkan output yang bagus.

Ada beberapa hal yang ingin kami, sebenarnya sudah di tanyakan kita ulangi, rekrut dalam rangka memenuhi kemampuan teoritik, kemampuan menguasai kalau tidak salah perundang-undangan tadi, kemudian empirik, mungkin aplikatif dari di lapangan bagaimana mereka sudah mulai mencerna apa yang akan dihadapi setelah keluar dari pendidikan yaitu atau empirik. Hanya pada waktu di tes masuk rekrutmen, tadi saya sama dengan Pak ...(suara tidak jelas) tadi, betul administrasi oke, ...(suara tidak jelas) kemudian psikotest ternyata masih pakai ...(suara tidak jelas) yang saya masih perlu tanya ...(suara tidak jelas) tes apa yang dipakai untuk kejujuran dan integritas yang oleh KPK sehingga ini harus menjadi standard karena standard ini akan menjawab tadi ya outputnya kemana lulusan IPDN yang sekarang ini, itu yang kami ingin tanyakan, tes kesehatan biasa TKD dan ...(suara tidak jelas) sama jadi itu yang kita ingin materi tesnya agar supaya menjadi standard mampu menjawab output dari IPDN yang kita cintai ini, itu pola rekrut.

endidikan, sudah bagus, banyak majunya, ada pengasuhan
aan ya itu bagus itu juga sebenarnya yang dipakai di akademi
tu, itu sudah bagus, sehingga yang ingin kami titipkan didalam
pengasuhan seperti ini, mau di dalam kampus, tidak ada problem kelihatannya, tapi pada waktu keluar
kampus, ini yang biasa terjadi. Saya ambil contoh ...(suara tidak jelas) saya di Kementerian
Perhubungan yang lalu, pendidikan di Perhubungan itu justru terjadi di luar, berkelahi di luar, karena
mereka juga dilatih kesmapaan tadi dan sebagainya, tidak mau kalah, akhirnya terjadi
permasalahannya dengan luar, ini akan membuat citra IPDN itu akan terganggu. Jadi mungkin saran
saya pengawasan ketika mereka keluar kampus, kalau di dalam saya lihat sudah bagus, saran saya itu
demikian.

Kemudian sudah ditanyakan juga tadi rasio pembina, pengasuh dibandingkan dengan yang
diasuh atau yang dibina rasionya sudah cukup, menurut pendapat saya, setelah dipaparkan
kelihatannya masih permasalahan, masih ada masalah, ini mungkin perlu dalam tataran tadi Bapak,
rektor hanya mengatakan masalah, *how to solved the problem* mungkin kita bisa sebagai mitra kita
akan coba sama-sama atasi masalah, akreditasi institusi, pola karir pengasuh, belum proporsional
yang sebaran dosen dan sebagainya dan itu saya lihat banyak masalah bagaimana menyelesaikan
saya kira perlu diajukan supaya kita bisa bantu menyelesaikan permasalahan senada, begitu pula
kendala-kendala dan berbagai aspek yang saya baca di sini banyak sekali. Saya sarankan kalau boleh
how to solved the problem, jadi kita sama-sama pecahkan, kalau sendirian tetap masalah, tetap
kendala terus, harus ada mitra, mitra saya kira Komisi II mendukung, bila perlu dengan anggaran yang
diperlukan kita akan coba bantu karena harapan kita pendidikan tertinggi ke pamongprajaan ada di
IPDN ini harus berhasil dan lebih berhasil di masa yang akan datang, menjawab yang Pak Budiman
katakan, bukan hanya kewenangan pemerintah saja, pejabat publik dan sudah *output looking oriented*,
itu sudah menghadapi globalisasi dan sebagainya, jangan sampai jago kandang saja kira-kira begitu ...
itu dan lain sebagainya.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan sekian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan? Biasanya kalau sudah Dewan Pembina bicara tambah-tambah lagi.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan,
Saudara Rektor,
Rekan-rekan sekalian,**

Saya tidak bisa bicara kalau senior sudah bicara apalagi saya sudah diperingatkan oleh
Pimpinan ya siapa lagi yang saya akan turut selain memang senior saya dan Pimpinan.

Jadi apa yang disampaikan Pak Mangindaan yang tadi mewakili Pak dari Demokrat, ya itulah
mewakili kami semua, jadi apalagi.

Jadi Pak Ketua, saran Pak Ketua saya ikut, saya ini paling patuh, Pak Ketua, Sapta Marga
saya ini. Jadi persisnya apa yang disampaikan Pak Mangindaan itu lah Demokrat, terutama saya habis
ya memang itulah yang benar semua. Jadi saya setuju mendukung itulah Pak Mangindaan. Jadi
tanggap saja apa yang disampaikan Pak Mangindaan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.PD., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sukiman, Nomor Anggota A-498 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman saya terdahulu, tapi paling tidak saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Willy dari Kalteng ya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah bahwa pertama, IPDN jangan terkesan tempat penampungan para pensiun yang sudah barang tentu ini bisa mematikan semangat kompetensi dosen-dosen muda dalam rangka mencapai apa yang diharapkannya saya pikir itu perlu untuk dipertimbangkan, itu konteksnya adalah dalam rangka memberikan dukungan. Dan yang kedua, tentu kalau kita bicara anggaran, saya melihat sebagai sebuah perbandingan, Pimpinan, dari 500 miliar itu kalau saya lihat ya kalau dibandingkan dengan Akpol dan Akmil memang terus terang IPDN masih ada di atasnya dan tentu dengan harapan tentu punya kelebihan. Kalau kita lihat perbandingan untuk 4 tahun saja itu satu siswa atau mahasiswanya artinya kurang lebih 450 juta untuk keseluruhan artinya dengan pengelolannya. Kalau Akmil atau Akpol itu kan berkisar antara 200 sampai 250 juta walaupun itu secara kasar saja, itu saya ambil perbandingan, artinya memang perhatian kita terhadap IPDN ini artinya di atas dan prioritas, karena apa? Dia akan mengeluarkan kader-kader terbaik bangsa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kita, itu yang pertama, dari sisi dukungan komitmen itu saya pikir selama memang itu dibutuhkan dan perlu dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia, Insya Allah kita tidak akan mempersulit dan tetap akan memberikan dukungan, itu catatan yang kedua yang saya ingin sampaikan.

Terus yang ketiga, IPDN tidak lebih sebagai UPT daripada Mendagri, harusnya dikelola secara sebagai sebuah lembaga pendidikan. Contoh soal, kalau dulu ingat cara saya IP ini atau IPDN tentu berkaitan dengan rektor itu tentu dipilih oleh senat, dulu dipilih 2 orang dari yang dipilih oleh senat. Dari 2 itu tentu menjadi kewenangan Mendagri untuk memberikan penetapannya, supaya apa? Supaya nuansa keakademisannya ini betul-betul tercermin disana. Namun demikian tentu ada plus minusnya artinya dalam hal itu, tapi yang ingin saya sampaikan saya pikir menyangkut hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana tata kelola dan pendidikan ini saya pikir perlu harus diperbaharui dan harus tetap yang baik untuk dipertahankan dalam rangka untuk menciptakan kader-kader muda yang betul-betul siap sebagaimana yang disampaikan para senior tadi.

Ini yang ingin saya sampaikan, begitu juga tentang pengasuhannya ya supaya betul-betul memperhatikan bagaimana kesinambungan dan kelanjutan daripada karir, saya pikir perlu juga supaya ini juga harus menjadi perhatian ya karena ini ya kalau habis disana saja waktunya saya pikir juga kasihan juga mereka, mungkin ada 3 catatan penting ini yang ingin saya sampaikan tetapi yakinlah bahwa Insya Allah kami dari Komisi II dan saya sebagai salah satu Anggota tetap memberikan dukungan karena ini walaupun mungkin banyak kritikan berkaitan dengan ada persoalan dulu tapi saya pikir itu hanya bagian dalam dinamika, tapi yakin saya pikir Pak Rektor dan jajarannya akan selalu memperbaiki yang selalu memperhatikan bagaimana terhadap siswa-siswa kita dan belum katakan

am melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan, nanti sehingga kita bisa melihat secara langsung sehingga secara ketika kita melihat kondisi lapangannya.

Terima kasih Pimpinan, dari saya mungkin itu saja catatan, lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri.

***Wabillahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Kita lanjutkan, masih ada 5 fraksi lagi ini, PKB? Ya silakan.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN , M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yanuar Prihatin Fraksi Kebangkitan Bangsa A-49. Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II,
Rektor dan segenap jajarannya,**

Saya ingin pendalaman saja, Pak Rektor, soal output IPDN terkait dengan kebutuhan pembentukan karakter birokrasi baru kedepan. Ini penting oleh karena ada persoalan besar didalam birokrasi kita yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mental, dengan karakter, dengan kinerja, dengan prestasi, dengan sikap mental yang ada di tubuh birokrasi, dan tentu ini kita sudah tahu efek negatifnya adalah pembentukan kultur birokrasi menjadi kurang sehat. Kompetisi didalamnya tidak begitu open, kemudian juga muncul pelanggaran-pelanggaran hukum di berbagai tingkatan birokrasi. Tentu ini masalah besar untuk bangsa kita.

Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengendors agar output IPDN itu mampu ikut membenahi hal-hal yang semacam ini kedepan, ini berarti kan soal mental. Bagaimana birokrasi menjadi lebih dekat dengan pelayanan publik misalnya, bagaimana birokrasi lebih akrab dengan kewirausahaan, birokrasi lebih akrab dengan pengentasan kemiskinan, birokrasi lebih akrab dengan pemberantasan korupsi, penegakkan etika dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya tadi saya melihat bahwa output yang dihasilkan oleh IPDN lebih kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kemampuan teoritik, itu betul dan itu penting. Yang kedua, kemampuan legalistik dan itu penting sebagai birokrat. Dan yang ketiga kemampuan empirik, tapi saya tidak melihat bagaimana mendorong atau menanamkan apa yang disebut dengan kemampuan emosional spiritualnya, ESQ lah kalau bahasa populer itu. Tren kedepan itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai dimana dia juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, sebab ini yang akan menjadi subkontrol terhadap tiap-tiap orang, ini yang akan menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan empati, simpati dan seterusnya.

Jadi saya ingin melakukan pendalaman sejauh mana gagasan ini bisa di-*insert* dalam kurikulum IPDN. Pola-pola pengasuhan yang diterapkan barangkali belum menyentuh kepada aspek itu, soal disiplin oke, soal bagaimana praja atau siswa ini memiliki disiplin waktu oke, tapi pada aspek kecerdasan, emosional dan spiritual saya kira itu jadi masalah besar, karena fakta yang lalu kita

ru mengalami kekerasan-kekerasan yang luar biasa dari para
pek spiritual emosionalnya.

n dengan gagasan tadi soal revolusi mental Pak. Tadi IPDN
menyajikan di, Bapak tadi menyajikan disitu soal bagaimana blueprint revolusi mental di tubuh birokrasi
kemudian dikaitkan dengan desain yang ingin dirancang oleh IPDN ke IPDN kedepan.

Saya kira itu sebagai ilustrasi, kita butuh pamong praja yang memenuhi standard dimana
emosional spiritualnya bisa lebih baik dari lulusan yang ada selama ini, kemampuan teknis oke,
kemampuan pikiran oke, kemampuan legalistik saya kira itu sudah berjalan selama ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari PKB, kami persilakan.

F-PKB (Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E, M.M.):

Terima kasih Pak diberikan kesempatan kepada saya. Saya Zainul Arifin Noor A-80, ya
mungkin saya ingin menanyakan tadi karena di IPDN ini kan ada yang terakreditasi C Pak ya, padahal
kita tahu bahwa semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu apabila ada terakreditasi C program
studinya maka mereka tidak boleh untuk menerima mahasiswa baru, tidak jauh kemungkinan artinya
dengan perguruan tinggi yang ada di IPDN, apakah ada perbedaan antara perguruan tinggi yang di
IPDN ini dengan perguruan tinggi yang lainnya Pak, ini yang perlu kita pertanyakan, karena sementara
ini Dirjen Dikti itu dengan getol sekali dia mengatakan bahwa artinya semua perguruan tinggi yang ada
di Indonesia ini tidak boleh terakreditasi C. Ini yang perlu kita sepakati bersama, apakah di IPDN ini
masih bisa diberlakukan demikian sehingga kalau toh itu bisa terakreditasi C, bisa dilakukan
bagaimana output mereka di lapangan pada saat mereka di lapangan kerja. Ini Pak yang bisa saya
sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dari Pimpinan, PKB mau menambahkan.

F-PKB (Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDI, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi yang kami hormati,
Kawan-kawan Anggota Komisi,
Rekan-rekan dari IPDN,**

Pertama, ini memang harus dikerjakan secara serius ini sama rektor soal akreditasi. Sebuah
perguruan tinggi milik negara uangnya disiapkan oleh negara, dibiayai oleh negara yang para alumni-
alumninya itu diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah akreditasinya C, tidak masuk
ini dalam pikiran saya ini ya dan sudah berdiri semenjak tahun 1956, tambah tidak masuk dalam pikiran
saya Pak Rektor, ini tantangan ini, tantangan. Pendidikan IPDN ini tidak boleh terlepas dari sistem
pendidikan nasional, IPDN bukan eksklusif, bukan eksklusif yang hanya mempunyai misi, visi dan

ian dari sistem pendidikan nasional dengan misi-misi yang

... t saya kesimpulan yang paling harus kita sepakati dalam rapat hari ini yaitu kita minta IPDN menaikkan akreditasinya dari C menuju B dan B menuju A. Sekolah-sekolah swasta saja yang didirikan baru tahun 80-an banyak yang sudah akreditasi B dan akreditasi A ya, uangnya cari sendiri mereka, ini soal saya kira syarat-syarat kemudian persoalan-persoalan yang Pak Rektor bentangkan didalam presentasi ini, ini semua bagian dari syarat-syarat ngisi borang di akreditasi itu Pak yang tidak terpenuhi yang Bapak bilang ini kurang ini, ini kurang ini, yang semua didalam ini, inilah syarat-syarat sebenarnya ketika kita mengurus akreditasi IPDN ini supaya meningkat.

Oleh sebab itu, Pak Rektor, ini tidak bisa, kita harus ada batas waktu ini IPDN ini supaya ada ... program untuk mengejar akreditasi ini, kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan kualitas seperti ini kita support, kita dukung, butuh biaya berapa, butuh dana berapa, malu kita Pak punya perguruan tinggi yang alumninya luar biasa banyaknya tapi ternyata masih C, butuh satu jurusan lagi, buat satu jurusan, kenapa mesti bertahan di dua jurusan ya, cari satu jurusan lagi, tambah, kalau perlu tambah lagi dua jurusan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini.

Jadi tolong Pak, kalau perlu IPDN ini buat tim khusus konsultan yang secara detail mempelototi orang yang harus diisi itu seperti apa, apa syarat-syarat yang perlu dilengkapi, saya kira tidak ada kesulitan, Bapak cari guru besar, siapa sih yang tidak mau jadi guru besar IPDN, banyak yang mau asal ditawarkan mau supaya memenuhi persyaratan itu, kurang fasilitas fisik, tinggal bicara sama Komisi II dengan Mendagri, jadi harus ada, kalau tidak kami ini bisa bubar karena tidak mungkin Pak itu ancaman dari Dirjen Dikti itu benar supaya kita ini bisa bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi bukan saja secara nasional tetapi juga secara internasional ya, jangan ini eksklusif, hari ini saya kaget Pak, sebuah perguruan tinggi milik negara yang lahir semenjak 1956 akreditasinya masih C, 2..., lembaganya B, kalau Prodyna yang 8 B, kita minta target akreditasi A lah ini ya, targetnya harus akreditasi A, apapun kebutuhan untuk menjadikan IPDN menjadi sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi A, harus kita berikan support, begitu.

Terus yang kedua, termasuk fasilitas mau perpustakaan atau apa wajar Pak, Bapak minta perpustakaan tidak dikabul-kabulkan Mendagri ini harus kita jelaskan juga kepada Mendagri ini bahwa perpustakaan itu penting, kalau tidak ya tetap C, tetap D ini tidak akan bertambah ini akreditasinya.

Kemudian yang ketiga, tolong Pak Rektor, bentangkan ini soal revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 ini, apa ini? Supaya kita juga bisa membantu untuk perbaikan-perbaikan ini. Kami ngobrol tadi sama Pak Wahidin ya bahwa IPDN ini kan karena bagian dari sisi pendidikan nasional bayangan kita ya menjadi sebuah perguruan tinggi dengan kultur kampusnya yang kuat ya, kita dorong kearah sana menjadi sebuah kampus produksinya adalah calon-calon birokrat yang handal tetapi kultur kampusnya itu tebal ya tidak menjadi kultur sendiri begitu ya.

Yang keempat ini saran teman-teman dari PKB tadi saya ingin menambahkan, saya kira membangun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita ya membangun karakter bangsa ini, saya kira ada 3 hal yang mesti dipenuhi, bukan hanya IPDN ini tapi semua juga, semua lembaga-lembaga pendidikan. Satu adalah, ini sesuai dengan konstitusi, Pak Rektor, satu adalah agama, pembangunan pemahaman dan kehidupan beragama supaya menjadi benteng bagi anak-anak ini, outputnya sederhana sebenarnya diminta oleh masyarakat, para lulusan IPDN begitu tamat menjadi sekretaris lurah, diminta orang menjadi khatib Jumat, dia bisa menjadi khatib. Ada yang meninggal diminta memimpin doa, dia bisa memimpin doa ya sederhana Pak.

Kemudian yang kedua, menyangkut karakter bangsa ini adalah soal budaya. IPDN ini harus kental ini muatan budayanya ya saya melihat ini prestasinya di bidang marching band sementara ada perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang tidak seperti IPDN ini mempunyai beban misi kebangsaan yang luar biasa, sudah keliling dunia misalnya membawa kebudayaan dari Jawa Barat angklung menjadi alat musik dunia, IPDN ini harus ada, karena begini Pak, soal budaya ini tidak sederhana, makanya kemudian masuk soal budaya ini dalam konstitusi kita, tidak sederhana, karena para *founding fathers* kita meyakini melalui kebudayaan inilah benteng kita menghadapi pengaruh

enyiapkan anak-anak muda kita dengan pemahaman dan udaya lokalnya maka kita tidak bisa membentengi anak-anak rhadap pengaruh buruk dunia, jangan sampai nanti anak IPDN

lebih tahu gamnam style daripada tari Saman begitu ya, ini bukan soal sederhana, bukan hanya soal kreativitas kemahasiswaan, bukan, tapi ini adalah rekayasa sosial terhadap anak-anak bangsa, harus memahami betul tentang kebudayaan dalam rangka untuk membentengi pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan-kebudayaan trans nasional, kekerasan dan kebebasan yang tidak terbatas ya, kebebasan dari barat, kekerasan dari timur, ini harus ada bentengnya sebagai anak muda Indonesia yang toleran. Ini saya kira itu yang kedua.

Yang ketiga mungkin ini sudah dilakukan oleh IPDN soal semangat kebangsaan, sudah ada, kesamaptan itu bagus, kita angkat jempol lah itu supaya bisa mengawal NKRI ini sampai kapanpun mengawal Bhinneka Tunggal Ika saya suka tadi ada visi kebhinnekaannya itu, itu bagus, cuma itu tadi, soal agama dan soal budaya itu harus kental di IPDN ini, jangan sampai kampus-kampus swasta yang kental dengan misi kebudayaannya sementara IPDN yang milik bangsa, milik negara, dibiayai negara tidak kelihatan misi kebudayaannya itu.

Yang terakhir soal budaya anti korupsi, Pak Rektor tadi membentangkan sekian kepala daerah, sekian pejabat-pejabat eselon yang sudah dihasilkan oleh IPDN kita juga ingin tahu dari sekian pejabat-pejabat daerah itu berapa yang masuk bui karena korupsi. Ini harus dibentangkan juga jangan yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek ini harus dibentangkan, mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada supaya ini menjadi kebanggaan, bangga kampus anti korupsi karena semua lulusan IPDN tidak ada yang korupsi, Insya Allah seperti itu, nanti kalau ada korupsi ini harus kita perbaiki karena budaya anti korupsi ini memang harus ditumbuhkembangkan semenjak awal.

Demikian Ketua, terima kasih.

***Wallahulmuwafiq Ilaa Aqwamiththoriq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Ada masih 4 fraksi lagi. Kami mulai yang dari bawah saja, Fraksi Hanura.

F-P.HANURA (RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H.,M.M.,M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan sejawat,
Pak Rektor dan jajarannya,**

Tadi sudah dijelaskan bagaimana pemaparan itu demikian rupa cuma yang menjadi pertanyaan saya begini, ini kita ini dibawah Sekjen, kita ini kan bukan Balai Latihan. Saya menjadi heran mengapa ini menjadi satu seakan-akan strukturnya ini dibawah Kesekjenan, ini kita bukan Dikla. Jadi tolong diperhatikan ini struktur IPDN ini yang melekat kedalam sebuah kementerian, saya rasa kurang tepat ini Pak.

Jadi saya tadi bertanya-tanya. Jadi saya tidak mau bicara output dulu karena struktur ini kita harus benahi dulu ini, bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang bukan tempat pelatihan malah institut, tapi didalam struktur kesekjenan, ini aneh bin ajaib ini, satu-satunya, kalau Bapak tadi katakan sudah ke Thailand, ke Korea, coba kita lihat dulu struktur mereka seperti apa, itu yang pertama.

man, Pak Mangindaan juga bicara output, iya kan, output itu sampai n, tidak terhingga itu, salah satu variabel faktornya tadi Pak Rektor belum menjelaskan siapa-siapa sih, jangan-jangan yang saya khawatirkan dosen-dosen yang di sana ini yang sudah widyaiswara, ditempatkan yang sudah tidak ada jabatannya, yang tidak punya kompetensi, ini seperti apa sebenarnya ini, karena itu tadi karena dibawah kesekjenan, lucu kan, tidak ada sebuah lembaga perguruan tinggi dibawah kesekjenan tapi eselonnya eselon I, ini menjadi menarik kita untuk, jadi bagaimana kita mengeluarkan output kalau struktur kita tidak benar. Ini coba dikaji kembali ini Pak Rektor.

Kemudian kalau kita berbicara masalah bagaimana menghitung produktivitas, kalau tadi berbicara output tentu saya tidak tahu ini nanti lelang jabatan ini Pak dalam kedepan ini lelang jabatan ini seperti apa ini nanti, apakah masih kita perlukan IPDN ini, saya tidak tahu ini, karena Pak Ahok sudah bilang, jangan camat, lurah, RT pun dia mau lelang. Betapa keraguan para pimpinan masa sekarang ini terhadap kinerja dari para pencetak produk khusus untuk apalagi diklaim ini adalah untuk tenaga-tenaga pengganti yang melekat di dalam sistem pemerintahan kita sekarang ini. Jadi mohon maaf ini, Pimpinan, ada berbagai institusi yang kita kunjungi di luar negeri, bagaimana kok bisa apa sih kriterianya kok ke Thailand, ke Inggris, Swedia, apa sih kriterianya yang dibangun kalau tadi saya katakan itu hanya membangun seminar atau hanya sekedar tukar siswa, apa yang menjadi kriteria kita mesti harus kesana ya. Saya tidak tahu ini, Pimpinan, apakah perlu kita harus bikin kunjungan kerja kesana ini, kan begitu, tidak perlu kita, jangan-jangan Jatnagor ini lebih bagus dari yang Thailand, kan begitu. Jadi ini mungkin menjadi catatan-catatan kita. Saya lebih *concern* kepada masalah struktur tadi Pak, adalah sangat tidak mungkin sebuah namanya institusi pendidikan itu dibawah kesekjenan, harusnya ini mesti menjadi suatu direktorat tersendiri, itu mungkin yang perlu satu, kenapa? Anggaran ini apakah anggaran ini nanti dibawah kesekjenan, apakah berdiri sendiri atau lembaga tersendiri, kita tidak tahu, ini derivatif ini, turunannya banyak sekali, Pak Rektor, jadi bukan hanya sekedar bicara struktur tapi kalau struktur ini kita bangun dengan benar melekat didalam suatu lembaga yang mana, maka substansi pun harus berubah, aturan mainnya pun menjadi berubah, rekrutmennya pun akan menjadi berubah dan seterusnya yang tentu disesuaikan dengan kultur yang ada, itu barangkali yang menjadi catatan saya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini waktu semakin dekat, kami persilakan PKS? Mau dari bawah terus Nasdem?

F-P.NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE):

Ya saya berusaha untuk patuh waktu lah karena mungkin Pak Tamanuri ada juga tambahan nanti.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore,

**Pimpinan Komisi yang saya hormati,
Bapak Rektor IPDN dan seluruh jajarannya,**

Yang pertama berkaitan dengan, saya nama Syarif Abdullah A-29 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Yang pertama berkaitan dengan, cuma saya bilang belum juga melihat itu kapan selesainya kampus Kalbar itu, soalnya memang dulu saya waktu DPRD provinsi termasuk

Sebenarnya kampus APDN yang sekarang itu dulu kampus dilah Pusdiklat Provinsi, itu sebenarnya, sekarang sih bagus

Untuk itu berkaitan dengan APDN sebenarnya saya terpikir dulu apakah APDN ini masih layak kita pertahankan, bukan masalah lembaganya, karena waktu setelah output dari APDN ini setelah otonom pada waktu itu, mainset kepala-kepala daerah itu berbeda, ada yang dari camat itu kepala Puskesmas jadi camat, kemudian apalagi lurah, tetapi ada juga baiknya ada lulusan APDN jadi kepala PU, Bina Marga, tapi itu mungkin yang harus kita koreksi ya termasuk kita juga sendiri, supaya output APDN ini betul-betul dengan jalurnya. Kalau di sekola-sekolah ABRI jelas yang bukan komando pasti dia lulusan dari AKABRI, TNI, POLRI dan sebagainya. Ini tentu memang harus kita harapkan lulusan APDN ini, Sekda saja mungkin bisa dihitung yang lulusan APDN itu, ada dari guru malahan ada yang jadi Sekda dan sebagainya.

Kemudian kedua, saya dapat memaklumi masalah akreditasi APDN ini, karena kalau kita lihat APDN ini banyak tenaga pengajar ini dari struktural sehingga mereka ini banyak tidak mempunyai bakat akademik. Kalau saya lihat disini kan profesornya memang ini kan mau ada ... untuk penilaian sampai akreditasi termasuk tenaga pendidiknya, itu kan klasifikasi pendidiknya, guru besarnya berapa. Saya lihat memang perlu mungkin harus ada tapi karena ini sekolah APDN ini merupakan sekolah kejuruan yang siap pakai, dibawah Departemen Dalam Negeri, ya tentu memang pendidik-pendidik mereka ini yang mengetahui bukan mencetak intelektual tapi dia dicetak sebagai yang siap bekerja sesuai dengan bidang tugasnya itu, tapi namun dengan demikian karena ini memang ini sudah secara umum, karena sekarang banyak, kita saja pegawai negeri saja menerima lamaran itu harus sudah akreditasinya perguruan tinggi itu A, soalnya banyak saya lihat di koran-koran akreditasinya A, dia tidak lihat negeri atau swasta karena sekarang kan sama.

Yang kedua, saya juga ingin tahu karena juga awal, apakah pengajar-pengajar di APDN itu juga sertifikasi dia. Kemudian jabatan rektor ini eselon juga ya? Berarti struktural? Eselon ya? Jadi saya ini mungkin beberapa hal yang menjadi anu saya kemudian juga ini banyak Pak, memang saya tadi juga disampaikan teman-teman saya berharap APDN ini bisa mengkombinasikan jadi bukan dia diharapkan nanti mampu sebagai pamong-pamong yang baik yang menguasai persoalan, tetapi juga dia bukan ABRI. Jadi ya ini bagaimana kombinasikan supaya tidak terjadi lagi kepada yang lama-lama, karena ini kadang-kadang over ini, senior-senior ini kadang-kadang overnya sehingga kan akhirnya terjadi lagi korban-korban yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan ini tidak lagi terulang, saya harap kemarin saja. Jadi lewat Pak Rektor sekarang bagaimana hal itu tidak terulang lagi tapi tentu pengawasan, jangan dilepaskan kepada senior, karena saya juga biasa kita juga pernah jadi mahasiswa kalau sudah diberi tugas wah itu jadi senior tidak pernah salah, makanya dulu saya selalu katakan dengan mahasiswa, kalian bisa mereformasi orang tapi kalian tidak bisa mereformasi diri sendiri, kenapa? Karena semua mahasiswa sampai sekarang itu masih tetap yang namanya jam kampus, opspek, dia tidak mau merubah itu, padahal dia juga tidak mau dengan cara-cara pendidikan militerisasi tapi dia dengan sendiri kan menerapkan militer disitu.

Saya pikir itu saja terima kasih mungkin ada tambahan dari Pak Tamanuri. Sekian.

***Wallahumuwwafiq Illaa Aqwamiththoriq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Masih ada Nasdem?

u tidak ada.

**Yang saya hormati Ketua,
Yang saya hormati Pak Rektor beserta jajarannya,
Rekan-rekan sekalian para Anggota,**

Saya juga alumni APDN tahun 76 yang diawali jadi Kasi di kecamatan sampai karir Sekda. Dan kita juga dari dulu sebenarnya APDN ini luar biasa, yang mengeluarkan Pak Moerdiono, ...(suara tidak jelas) hebat-hebat, tapi yang perlu sekarang ini karena sudah perkembangan dunia ini tadi saya lihat bahwa IPDNnya sendiri sudah mengarah kepada universitas. Jadi tidak ada lagi kelihatannya yang seperti kami yang senior junior yang hormat menghormat atau yang bawah dengan yang atas. Sebenarnya inilah ciri-ciri khasnya APDN itu seperti itu, tidak bisa kita hilangkan, kalau kita hilangkan seperti universitas, *say hello* saja tidak bisa, lain, bukan IPDN itu, karena IPDN itu adalah anak senior, ...(suara tidak jelas) ada panggilan disitu, kakak, kakak, kakak.

Oleh karena itu harapan saya adalah bahwa karena kita ini adalah menggunakan ...(suara tidak jelas) di IPDN ini, jadi antara akademis dengan lapangan mesti ada presentasi. Jadi ada yang namanya kuliah kerja nyata seperti dulu itu yang kami lakukan, jadi apa 25 persen, apa 10 persen gunakan, jadi apa yang didapatkan ilmu dari akademis itu bisa dipraktekkan. Jadi begitu dia keluar itu nyata bahwa tamatan APDN itu adalah betul-betul orang-orang yang langsung bisa bekerja, jangan seperti yang lain-lain, karena inilah spesifiknya kita, spesifiknya IPDN itu, IPDN ini dari situ letaknya, kalau kita sama dengan universitas ya bukan IPDN entah apa. oleh karena itu kita batasi perkembangan-perkembangan yang sudah terlalu jauh. Kita kembalikan saja dulu bahwa IPDN ini adalah mendidik pamong praja asli yang akan kita turunkan di lapangan.

Kemudian apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi yaitu soal evaluasi itu, jangan sampai ada yang penggeblengan, sebab anak saya sendiri keluarnya dari IPDN itu, patah itu dia punya rusuk itu dulu yang sekarang dia jadi bupati. Jadi ini tolong kita koreksi lah jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, itu bukan mendidik, untuk apa, bukan mendidik itu malahan menimbulkan rasa cemburu, menimbulkan rasa magel antara senior ke junior. Kami dulu juga pada tahun 76, kalau ada kesalahan itu lari lapangan 3 kali atau push up 10 kali cocok itu caranya bukannya dipasang dada antara lemari dengan lemari, ditanjang segala macam, ditonjok, itu bukan mendidik namanya. Oleh karena itu, itu tugasnya Pak Rektor ini supaya kalau masih ada, hilangkan itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dari Nasdem masih ada? Cukup ya? Kemudian dari PPP, yang dari Nasdem tadi yang pertama Pak Syarif Abdullah, kemudian yang kedua Pak Tamanuri, Pak Tamim dari PPP.

F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Rektor,
Teman-teman sekalian,**

barakatuh.

Saya Amirul Tamim, Nomor Anggota A-544 asal Sulawesi Tenggara. Jadi saya kira saya sama juga Pak ...(suara tidak jelas) saya alumni APDN tahun 80 Pak, Makassar, IT tahun 86. Jadi memang kalau melihat perjalanan IPDN atau yang dulu STPDN dan lain sebagainya, saya kira ini tidak bisa kita abaikan dengan langkah-langkah yang diambil Pak Rudini. Saya kira ketika Pak Rudini jadi Mendagri ada program itu bagaimana agar pamong-pamong praja itu mempunyai wawasan nasional yang kuat sehingga kami dulu para camat itu dibuat suatu program Suspim di ...(suara tidak jelas) Bandung waktu itu angkatan berapa, saya kira Pak Rektor juga masuk dalam program itu.

Jadi mungkin yang ingin saya kemukakan disini tentu dari pengalaman. Kalau dulu kita ikut pendidikan di APDN itu yang ditanamkan itu bagaimana kita menjadi kader pemerintahan dan pemerintahan itu ditanamkan itu bahwa pemerintahan itu seni sehingga kita ditanamkan dalam kondisi apapun suatu kader itu bisa memainkan peran karena melihat pemerintahan itu sebagai seni, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mungkin Pak Rektor, dari pengalaman kami lihat di lapangan karena saya juga pernah jadi camat, pernah Kepala Dinas Pendapatan, pernah Kepala Biro sudah kemudian pernah Walikota yang sekarang *Alhamdulillah* jadi DPR ya, tapi skema yang dulu dipolakan tamatan apakah itu APDN, STPDN itu pola skemanya itu jenjang karirnya sampai dengan eselon I di Kementerian Dalam Negeri, itu pola dulu. Saya tidak tahu sekarang apa masih dipolakan seperti itu. Kalau dipolakan seperti itu tentu kan harus ada suatu pola juga mengikuti bagaimana mereka setelah keluar dari pendidikan dan bagaimana perjalanan karir. Pengalaman yang kita lihat bahwa angkatan pertama, kedua, tidak tahu sampai ke berapa mungkin sampai ketiga STPDN itu, itu bagus, itu baik, setelah itu, itu hampir-hampir kita tidak punya kebanggaan untuk menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang sesuai skema tadi. Katakanlah kalau mereka tamat kan mereka itu kalau dulu yang angkatan pertama malah itu hanya 2b ya, kalau sekarang kan 3a, 2b dulu itu susah kita mau tempatkan mau job apa dia, tetapi kalau kita kasih jabatan untuk jabatan apa saja, itu bisa, setelah kita lihat ternyata inputnya yang bagus, karena dulu selektifnya itu merupakan IP-lpnya yang bagus itu yang diterima. Kemudian yang di pertengahan itu mungkin itu banyak ...(suara tidak jelas) anaknya ini, ponakannya ini, tingginya malah ada yang tidak cukup, sehingga itu yang merusak.

Jadi mungkin saran saya, Pak Rektor, mungkin ini diinventaris kembali, mereka sudah ada di posisi mana, karena memang pendidikan yang ditanamkan itu mereka ingin menjadi pamong yang baik dan memang mereka lakukan sehingga ketika ada proses pemilihan Pilkada, mereka netral, karena kenetralannya tidak dapat jabatan, karena yang jabat ya itu tim sukses, itu korban daripada kenetralan. Yang ingin saya maksudkan mereka diinventarisir, didata kembali, karena ini menjadi tantangan, Pak Rektor, ketika nanti jabatan-jabatan ini semua dilelang, pengikut lelangnya termasuk alumni sini, kemudian tidak lulus, itu memberikan dampak terhadap penilaian pendidikan kita ini. Oleh sebab itu mereka diinventarisir bagaimana dicarikan pola mereka diajak kembali dibekal kembali, katakanlah mungkin acara reuni satu minggu tapi dibekali mereka untuk ada penanaman-penanaman apa, karena kalau tidak, mereka ini bisa menjadi korban daripada ketatnya seleksi untuk persaingan di masa yang akan datang.

Kemudian selanjutnya saya kira kalau kita skemakan karirnya, karena kalau dulu itu skemanya kasih dia ke kelurahan kemudian dia jadi lurah, jadi Sekcam, jadi camat, kepala bagian, asisten, kepala-kepala dinas, Sekda, mereka pindah di provinsi, kepala dinas, Sekda di Provinsi karir sampai ke pusat, malah diharapkan bagaimana mereka bisa jadi kepala daerah, tapi saya lihat mungkin kita semua tidak berjuang. Sekarang Undang-Undang ASN ketika mau jadi kepala daerah, berhenti jadi pegawai negeri. Ini juga mungkin kalau PPP ini ingin mengajukan agar mungkin kita mengamandemen pasal itu agar hak pegawai negeri, TNI/Polri itu bisa jadi kepala daerah, tidak harus berhenti, mungkin juga itu Pak Ketua, di Undang-Undang Pilkada kita lihat ya, karena jangan sampai, ini kan sudah masuk suatu suasana persaingan, bayangkan kalau memimpin daerah yang membatasi dari TNI/Polri

Pak, berapa titik itu salah memilih, tidak punya wawasan ya, mau punya daya saing apa bangsa ini? Saya kira ini perlu warga negara termasuk pegawai negeri TNI/Polri ini ... mungkin kampus, rektor perlu memberikan bagaimana menyuarakan ini juga dengan tentu argumen-argumennya yang ini.

Yang lain saya kira sama dengan teman-teman semua, tadi saya lihat Pak Rektor punya paparan rektor disamakan dengan eselon I tetapi kelihatannya seperti UPT. Saya tidak tahu bahwa rektor yang disamakan eselon I begitu Pak Rektor mungkin berhenti, jangan sampai dikembalikan di eselon II, iya kan, kalau pola ini kita mainkan, tidak jelas statusnya, ini repot, sehingga seorang rektor tidak punya motivasi untuk paling ya kalau jadi rektor ya memenuhi syarat saja bagaimana ini routing jalan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa mempunyai motivasi lain.

Saya kira untuk sementara demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tamim.

Saudara-saudara sudah jam 17.00 kita perpanjang saja sampai 17.30 setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Terakhir mungkin dari PKS, tidak ada ya?

F-PG (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Tambahan saja Pak satu masukan saja 2 menit.

Pak Rektor,

Tadi kan kita sepakat bahwa ditanyakan tentang tes, tentang mentalitas lah katakan ya atau wawasan tentang ketakwaan dan sebagainya. Saya kira Bapak kan sudah punya perangkat tadi Dinas Psikologi yang ...(suara tidak jelas) apa tinggal Bapak minta saja kok, contohnya begini AKABRI ya, karena saya ...(suara tidak jelas) tes AKABRI ya, bahwa AKABRI minta bahan bakunya untuk perwira, setelah sudah jadi untuk perwira dia lulus, kita tes kedua adalah bagaimana perwira ini ke matra, darat, laut, udara, polisi, dia dapat juga angka itu, artinya parameter itu ada. Jadi katakan pada tes psikologi Bapak minta persyaratan ini praja ini, calon praja ini apa disamakan dengan persyaratan mencari calon perwira seperti AKABRI itu, kan tinggal minta, maksudnya tinggal minta ke Dinas Psikologi Angkatan Darat sehingga bisa mendapatkan kualitas ini, ini saran Pak ya, tapi sampai hari ini saya dengan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat pernah berdebat bahwa ini adalah lulus untuk calon perwira, begitu dites kematraan, dia tidak lulus, jadi tadi yang lulus ini perwira apa? Begitu dipilah mana darat, mana laut, mana udara, mana polisi, dia gugur tidak lulus.

Jadi artinya gunakanlah parameter ini koordinasikan dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat mencari itu, tetapi kalau di TS TNI masih ada tes mental ideologi, tidak tahu masih ada atau tidak sekarang, saya tidak tahu, wawasan kebangsaan sehingga yakin betul, karena kalau diambil dari KPK hanya untuk mengetes integritas dan ini, saya kira bukan bidangnya itu dan umum, tapi kalau itu dinas psikologi itu sudah ada parameternya masing-masing, matriknya itu ada.

Jadi ini saran Pak, jadi akan mendapatkan praja yang bagaimana diskusikan dulu dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat, nanti Dinas Psikologi Angkatan Darat akan mengeluarkan matriknya

ini, kalau di TNI, orang mau jadi komandan harus ada unsur atau gagal di pertempuran, bisa dilihat itu tesnya, ada tidak jiwa teritorialnya. Jadi saran kalau bisa tambah 3 menit

ini, koordinasikan dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat karena sudah kontrak itu.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita berikan kesempatan kepada Rektor IPDN untuk menjawab beberapa hal tadi. Tentunya nanti tindak lanjut akan kita juga terus menerus untuk menyampaikan hal-hal yang penting.

Kami persilakan.

REKTOR IPDN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak seluruhnya Anggota Komisi II,

Kami mengucapkan terima kasih dan suatu kebanggaan bahwa pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran menandakan bahwa semuanya Bapak-bapak sangat mendukung ...(suara tidak jelas) IPDN. Saya tegaskan kembali bahwa kampus ini adalah milik bangsa Indonesia, milik kita bersama, saya manajer lapangan saya dan saya siap tentunya untuk bersama-sama memperbaiki kampus kita ini.

Yang pertama sekali yang sangat penting bagi saya adalah soal akreditasi. Jadi saya jelaskan atau tekankan kembali bahwa akreditasi IPDN itu kampusnya akreditasi institusinya adalah B. Akreditasi ini selain institusinya di akreditasi, prodi-prodinya juga diakreditasi. Dari 10 prodi yang itulah masih yang 2 yang C begitu, masih ada 2 yang C, itu tadi dalam ...(suara tidak jelas) sudah disampaikan. Jadi 8 Prodi akreditasi B 2 program studi terakreditasi C, institusi atau lembaga IPDN adalah B. Jadi tak ada persoalan soal kerja kami karena lembaganya adalah B. Akreditasi C ini adalah beberapa tahun yang lalu dan ini pertengahan tahun 2015 ini semuanya akan diakreditasi ulang dan Insya Allah sesuai dengan saran Bapak/Ibu dan kami selama 2 tahun dengan lembaga penjamin mutu sudah melakukan perbaikan-perbaikan, Insya Allah beberapa yang B itu mudah-mudahan bisa mencapai A dan yang C amin Insya Allah akan kita perjuangkan yang C itu menjadi B, mudah-mudahan, nanti tentunya pada akhir tahun kami akan berubah sudah. Selesai akreditasi kami laporkan tertulis nanti kepada Pak Menteri tembusan Ketua Komisi II.

Kemudian soal dosen. Jadi dosen yang pindah ke IPDN itu memang memungkinkan dia pindah dari pejabat struktural sepanjang dia memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi peraturan kita ini memang masih ada peraturan yang mengatakan apabila seorang pejabat struktural eselon II keatas mau pindah, sebelum 2 tahun pensiun dia boleh diterima sebagai dosen sepanjang dia lulus tes di universitas tersebut. Jadi kalau ada kesan seolah-olah ada pejabat struktural yang sudah mau pensiun, pindah, itu memang tinggal 2 tahun pensiun, tinggal 2 tahun pensiun. Barangkali seperti Bapak Mantan Walikota Tangerang itu terdaftar sebagai dosen kita juga karena sebelum beliau pensiun beliau memang sudah mengajar IPDN, menjadi Widyaiswara kemudian masuk ke partai misalnya demikian. Jadi pejabat-pejabat yang pindah ke IPDN itu semuanya memenuhi syarat umur maksimal sebelum dia pensiun. Terkesan banyak yang masuk ya itu barangkali yang akan kita tata kedepan. Artinya akan kita perketat penyaringannya, itu saja, kalau peraturannya selagi dia belum, usianya cukup dia boleh masuk, nanti akan kita perketat. Bahkan saya sudah membentuk tim yang diketuai Pembantu Rektor I, Prof. Wirman, nanti saya minta ditambahkan juga jawabannya, kita akan perketat penerimaannya

...keselon II yang melamar jadi dosen tetap kita tes ulang, kira-kira akan dosen.
...struktural kampus, memang juga sebagian pertanyaan tentang itu. Contoh misalnya Direktur IPDN Kampus NTB, itu mantan Sekda Provinsi NTB, pindah ke kampus sebelum pensiun. Jadi dia jadi Sekda Provinsi kemudian dia jadi Direktur Regional dari segi manajerial sih sebenarnya sudah hebat kan. Direktur kampus Papua itu dulunya adalah Kepala Bagian Pemerintahan di Tolikara itu alumni APDN, Doktornya di Padjadjaran, perempuan asli Papua, mencari yang itu, repot itu, mencari orang Papua yang doktor yang ...(suara tidak jelas) senang-senang susah lah, kita dapat dari sana. Direktur IPDN Kampus Manado mantan Kepala Badan ...(suara tidak jelas) Provinsi Sulawesi Utara, sebelum pensiun masuk IPDN dia terus akhirnya jadi direktur. Direktur IPDN Makassar mantan Sekda Takalar, Sekda Tingkat II Takalar, sebelum dia pensiun dia pindah ke IPDN kemudian pada saatnya dia menjadi Direktur IPDN Makassar. Direktur IPDN Riau mantan Kepala Badan Kesbang Provinsi Riau. Kita menjadi Direktur IPDN Riau itu susah waktu itu, akhirnya kita mencari pejabat struktural yang alumni kita, kita bujuk-bujuk dia mau pindah, kita jadikan Direktur IPDN Riau. Jadi ini tetapi dia memenuhi syarat ...(suara tidak jelas) tapi kalau nanti misalnya ada kesan sejumlah dosen mungkin seperti tadi yang dikesankan tadi, kami berjanji akan memperketatnya apalagi sudah menjadi area perdebatan publik, Pembantu Rektor I Bidang Akademis Prof. Wirman saya sudah angkat sebagai ketua tim nanti untuk menyeleksi secara ketat semua pegawai negeri yang mau masuk ke IPDN. Kira-kira demikian tentang dosen.

Kemudian tentang APDN regional. Kita sekarang ini menyimpulkan dari rapat senat bahwa 7 kampus regional sudah cukup. Namun apabila pemerintah pusat nanti dalam kajian berikutnya kira-kira kampus regional itu mau ditambah dengan berbagai alasan, maka sebenarnya rekomendasi kami hanya merekomendasikan 3 lokasi kampus baru saja. 3 lokasi kampus baru itu, ini sudah kami plenokan dengan Dewan Guru Besar di IPDN, satu adalah Banda Aceh, di Aceh meletakkan kampus paling ujung, yang kedua adalah Kalimantan Selatan dan yang ketiga adalah Jawa Timur, dan Jawa Timur itu pun direkomendasikan para guru besar untuk ditempatkan di Malang sebagai sejarah pertama lahirnya APDN di Indonesia, 3 lokasi itu saja kalau misalnya mau dikembangkan, tapi saat ini kita berkesimpulan 7 sudah memadai seperti itu kira-kira untuk pengembangan kampus IPDN selanjutnya.

Kemudian Alhamdulillah soal dukungan anggaran, kami merasakan memang sudah sangat memadai dan sangat cukuplah untuk menjalankan roda organisasi IPDN ini.

Lalu soal langkah-langkah signifikan dalam meredam kekerasan. Ini banyak sekali pertanyaan mungkin sekaligus dijawab termasuk Pak Henri tadi ini masih ada kekerasan ini, jangan-jangan ada tapi didiam-diamkan begitu. Jadi mohon maaf, saya menjadi rektor pertengahan tahun lalu, 2 bulan setelah itu kita memang sepakat dengan para guru besar bahwa langkah untuk meredam kekerasan adalah dengan memberikan sanksi yang keras. Oleh karena itu pada satu bulan setengah berikutnya kira-kira bulan September kita mengembalikan 15 praja asal Maluku karena 15 praja itu memukul adiknya, yang dipukul tidak apa-apa ya kuat-kuat juga barangkali, kita kembalikan serentak 15 orang itu sekaligus. Saya harus mensosialisasikan kebijakan itu dengan Pak Alex Litaay waktu itu karena beliau dari sana dan Anggota Komisi II bahwa 15 ini saya kembalikan karena sedikit terjadi perkelahian pada saat itu, jadi sudah hampir setahun 3 bulan yang lalu. Sejak itu Insya Allah, Alhamdulillah tidak ada lagi kekerasan yang ramai tadi seperti yang disampaikan Pak Tamanuri tadi. Putra Pak Tamanuri, Agung Mangkunegara adalah Bupati Lampung Utara, bupati termuda alumni IPDN yang tamat pada angkatan 14. Jadi anak beliau ini taman 9 tahun yang lalu, kawan-kawannya belum jadi camat. Jadi kalau tadi misalnya Bapak ada mengatakan angkatan 13 keatas ada kekurang-kurangan, itu saya pikir memang variasi lah ya ada juga yang bagus. Putra beliau adalah kebanggaan anak-anak di kampus karena alumni termuda jadi bupati angkatan 14, 8 tahun, 9 tahun tamat IPDN itu angkatan 14 Pak ya, angkatan 13 satu tahun diatas anak Bapak itu menjadi Walikota Sibolga, angkatan 13, kemudian angkatan 10 itu Bupati Subang dan seterusnya sampailah angkatan 1 Murung Raya barangkali adik Bapak ya dan beliau pun sudah ...(suara tidak jelas) sampai kampus, Alhamdulillah, itu sebagai

juga yang non job itu ada dia, ya itu masing-masing lah, itu membenahan-pembenahan seperti itu Alhamdulillah anak-anak aga mereka sendiri.

Kemudian pengasuh juga yang melakukan yang karena emosi menampar itu semuanya kita tarik, 17 orang pengasuh kita pecat jadi pengasuh, tapi pengasuh itu kita kembalikan baik-baik ke daerah dan kita minta tolong Sekda Provinsi sekolahkan dia, dia bukan tak cocok, ini hebat, saya bilang, nanti bisa jadi kepala Satpol PP misalnya begitu tapi tidak cocok jadi pengasuh. Kepala pengasuhan Kampus Riau saya pindahkan jadikan minta tolong ke Riau, jadilah protokol sekarang di provinsi ini cocok jadi protokol karena jadi pengasuh agak tak bisa menahan emosi, rata-rata mereka di tempat yang lain masih bisa. Jadi dengan ketegasan pengasuh yang melakukan misalnya agak ya jewer-jewer telinga juga kita tarik dari pengasuhan dan anak-anak yang melakukan kekerasan kita kembalikan tanpa pandang bulu, ada anak Sekda Provinsi, ada anak walikota segala macam dan tak sempat berhubungan dengan kita karena kita punya waktu 24 jam saja, sehari ini kejadian, periksa, benar, besok sudah kita kembalikan. Jadi begitu orangtuanya datang, ...(suara tidak jelas) menelepon anaknya sudah kembali. Jadi sampai sekarang, Insya Allah, Bapak Hendri kekerasan itu memang Alhamdulillah hampir tidak dapat kita temukan lagi, walaupun ada masih kejadian tanpa sengaja mereka, kita tetap tindak tegas. Pada saat kejadian dengan anak Maluku itu, 5 orang yang anak Maluku yang tingkat baru itu tidak mengaku mula-mula, tidak mengaku bahwa dia dibully sama seniornya, maka saya putuskan yang 5 itu saya berhentikan saya bilang, karena anda melakukan kerasan mandiri atas diri anda sendiri, baru dia mengaku, sudah ngaku baru saya kembalikan, seperti itu jadinya. Jadi Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi secara berkelompok, sekali-kali terjadi berantam mungkin tak sengaja tapi tetap kita skorsing, tetap kita kembalikan dan tidak naik kelas.

Kemudian, saya pikir IPDN membuka program S1, S2 dan S3 itu menurut rapat guru besar kami itu tidak menyimpang dari program, termasuk yang ditanyakan Pak Tamanuri tadi bahwa yang kita gambarkan sebagai APDN yang dulu terus sampai sekarang itu terus berkembang sebagai program ...(suara tidak jelas) D4 dan jumlah mahasiswanya sangat ramai dari 7.471 praja IPDN tingkat muda, madya, nindya dan wasana praja itu yang dimasukkan ke program sarjana S1 cuma 418, hanya 418 yang memenuhi program akademik tadi, Bapak. Jadi semuanya masih di program yang spesifiknya tadi yaitu program vokasi tadi semuanya dari 7.471 tadi hanya 418 yang masuk S1. Kemudian kita mendapat mandat membuka program S2 dan S3 ini tidak boarding, jadi mereka datang ke kampus yang Cilandak itu mereka sekolah seperti biasa, dan mengapa kita diizinkan untuk program doktor? Seperti yang tadi Bapak gambarkan juga bahwa ada hal yang beda dengan ilmu pemerintahan yang di IPDN ini seperti digambarkan Pak Budiman tadi, ada hal yang beda. Jadi pendekatan cybernologi yang pemerintahan ini basisnya adalah rakyat, tidak semua perguruan tinggi meletakkan ilmu pemerintahan, basis besarnya pada rakyat, makanya pada saat Institut Ilmu Pemerintahan dulu didirikan, Prof. Mudiharjo tidak setuju termasuk dari UI, kenapa? Karena mereka menganggap ilmu pemerintahan ini cabang dari ilmu politik, jadi ini adalah vokasi ilmu pemerintahan karena itu perkembangan ilmu pemerintahan di kampus IPDN sampai diberikan mandat melaksanakan program doktor adalah bentuk pengakuan negara atas adanya ilmu pemerintahan yang berdiri sendiri bukan cabang daripada ilmu politik.

Ini yang saya pikir dia masih bisa dibuka untuk diperdebatkan tapi kira-kira alasannya seperti itu. Jadi tidak yang vokasi tadi Pak, jadi APDN yang dulu itu berkembang dengan vokasi sekarang. Jadi IPDN sekarang mengemban amanah satu vokasi D4 kemudian Strata Satu kemudian program S2 dan S3. Jadi anak kita yang IPDN tadi yang sekarang vokasi D4 itu tamatnya mendapat gelar sarjana sains terapan pemerintahan SSTP, sedangkan sekolah yang di Cilandak yang 418 orang tadi dua angkatan itu, satu angkatan cuma 200 lebih itu mendapat gelar sarjana ilmu pemerintahan dan ini juga untuk mengantisipasi perkembangan zaman sekarang ini. Kami membuka kelas bilingual 150 orang juga mengantisipasi perkembangan zaman untuk menyiapkan kader-kader IPDN kedepan.

Saya laporkan juga bahwa tes Bappenas tahun kemarin, 7 orang anak kita IPDN lulus sekolah ke luar negeri untuk menjadi kader dosen, ada yang ke Amerika, ada yang ke Polandia, ada yang ke

...lillah dan itu terus kita kembangkan supaya mereka nanti kampus, karena kalau sekiranya nanti kita tak siapkan bagian khawatir nanti justru yang mau tinggal di kampus tidak ada, karena program yang D4 tadi yang vokasi kalau ditanya mau jadi apa? Saya mau jadi bupati, saya mau menjadi gubernur, yang S1 ditanya mau jadi apa? Saya mau jadi dosen, jadi mereka kita kaderkan.

Dan tidak masalah pengasuh tadi, Bapak, karena begitu mereka jadi pengasuh mereka tidak kita batasi misalnya 2 tahun kerja baru S2, tidak, begitu dia masuk IPDN, baru kerja langsung suruh tesis 2, lulus, tahun depan langsung sekolah, Ketua, itu yang ...(suara tidak jelas) yang diberikan mereka yang tinggal di kampus. Kemudian setelah mereka selesai S2, mereka silakan berkomunikasi kepada pemdanya, mau pulang, silakan, mau tetap di kampus, harus S3, setelah S3 mau pulang ke daerah, silakan, mau tetap di kampus, silakan, karena kader dibawah ini terus kita rekrut sesuai dengan berapa yang pulang, berapa yang kita rekrut baru, seperti itu kita harapkan nanti. Jadi mereka tetap termotivasi di kampus tetapi tetap kita perjuangkan jabatan fungsional pengasuh tadi seperti itu. Jadi kehidupan mereka di kampus sangat dinamis, ada praja alumni yang 2 tahun Pak saya lapor walikota saya menyuruh saya pulang, pulang, nanti anak baru kita rekrut.

Kemudian Pak Budiman, pada saat APDN Nasional dulu baru berjalan, Menteri Dalam Negeri mengirim pejabat Depdagri ke ENA Perancis termasuklah yang berangkat Bapak Gubernur Sulawesi Utara sekarang Pak Sarundajang termasuk dalam tim yang berangkat itu. Jadi ada kedekatan beberapa hal tentang ENA dan kami tahun ini Insya Allah akan berkunjung kesana kalau tidak ada halangan kita sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan di Kedubes Perancis, kebetulan atase pendidikannya sekarang kan sudah pulang jadi rektor di Kepulauan Riau kebetulan baru tiba dari haji, beliau sudah memberikan koreksi ...(suara tidak jelas) di sana, sebagai perkembangan seperti itu.

Kemudian soal jumlah alumni, kami menerima praja tahun ini 1.458, dulu dua tahun yang lalu 2.000, itu kalau mereka tamat kemarin yang diwisuda Presiden 1.457 itu kalau disebar ke kabupaten cuma dapat 2 satu kabupaten, banyak bupati yang malah kirim surat ...(suara tidak jelas) jadi memang itu nanti akan diukur kira-kira kebutuhannya berapa tapi juga terikat dengan kemampuan kami mendidik berapa karena jumlah asrama dan lain sebagainya.

Kemudian soal forum ilmiah. Jadi kami sangat memaklumi Pak Dadang tadi, memang kita mendapatkan laporan tentang itu bahwa anak-anak kadang-kadang di lapangan dibawa ke hal yang ilmiah menjadi berkurang, karena itulah maka tadi program S2, S3 itu kita kembangkan untuk hal-hal seperti itu. Sekarang ini Prof. Sado dari kami sedang bekerja sama dengan ...(suara tidak jelas) Jepang meneliti tentang inovasi dan leadership, itu nanti juga terkait, bagaimana kita menambahkan dalam kurikulum sehingga mantan atau alumni IPDN selain kemampuan leadership juga berinovasi lebih tinggi, itu nanti akan kita kembangkan lagi.

Barangkali untuk membagi kepada kawan-kawan yang lain beberapa hal saya minta tenaga akademis Prof. Wirman nanti tentang Undang-Undang ...(suara tidak jelas) harus mundur ini kemarin waktu rekan-rekan kita dari Papua menggugat Undang-Undang ASN yang menyuruh pegawai mundur, itu saksi ahlinya Pak Prof Dr. ...(suara tidak jelas) nanti juga dia minta memberikan penjelasan.

Silakan Prof. Wirman.

PEMBANTU REKTOR IPDN (PROF. WIRMAN):

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Atas izin Pak Rektor, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Di periode ini memang sesuatu yang unik tadi saya kira Bapak-bapak sudah menangkap apa yang unik-unik tadi. Di level eselon I setara eselon I tetapi UPP, kemudian sistem pendidikannya ada ... yang tidak ditemukan di

oritik, legalistik dan empirik itu pun tidak ditemukan di tempat
n teoritik itulah makanya kenapa dari sisi ilmiah IPDN selalu
ciptakan ilmuwan, tidak melahirkan ilmuwan tetapi IPDN itu
adalah melahirkan praktisi-praktisi yang akan mengimplementasikan berbagai kebijakan dari
Kementerian Dalam Negeri. Itu pula makanya kalau tadi Pak Budiman mengatakan bahwa sebaiknya
untuk mendidik para politisi maka memang nawaitu awal dari IPDN itu memang tidak untuk itu, IPDN itu
dibentuk adalah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan
pemerintah daerah, jika kedepan barangkali dituntut untuk itu barangkali bisa diperbincang lebih jauh.

Oleh karena itulah makanya dosen-dosen dari IPDN pun juga agak unik, uniknya karena tidak
semata-mata dia ilmuwan tetapi adalah orang-orang yang memang juga memahami tentang praktek-
praktek lapangan, karena itu pejabat-pejabat struktural dari daerah sepanjang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan, 58 maksimal untuk eselon II dan eselon I, 56 tahun untuk eselon III
kebawah dan memenuhi persyaratan lain untuk kita terima sebagai dosen di IPDN.

Berikutnya sertifikasi bahwa semua dosen yang ada di IPDN adalah mengikuti ketentuan yang
ada di Diknas. Jadi tidak ada kita 50-60 persen dosen IPDN sudah sertifikasi meskipun tadi memang
ada pejabat-pejabat direktur kampus daerah dan lain-lain memang dari pejabat struktural dari Sekda
provinsi dan lain-lain tapi mereka sudah beralih fungsi ke pejabat fungsional.

Yang menarik tadi dari Pak Yanuari dari PKB bahwa output terkait dengan pembentukan
karakter sebenarnya kita di IPDN sudah mengupayakan untuk itu dengan membentuk beberapa
kurikulum yang mengarah kepada pembentukan karakter itu. Misalnya tentu kita ada mata kuliah etika
pemerintahan, ada tentang hak asasi manusia, ada tentang penanggulangan korupsi, agama,
kemudian wawasan kebangsaan dan lain-lain sebagainya itu. Blueprint ... kedepan sekarang kita
merancang bahwa IPDN sekarang sedang menyusun postur alumni APDN yang kita kehendaki, karena
selama ini terus terang saja Bapak/Ibu sekalian, postur alumni kita itu selama ini kita belum begitu jelas
tetapi sekarang kita merancang postur alumni IPDN yang kita kehendaki itu seperti apa, dari postur
itulah baru kita mengharapkan berbagai kurikulum yang tentu cocok untuk mendukung itu.

Ada tadi dikatakan bahwa IPDN tidak mencetak ilmuwan, sebagian besar memang adalah
vokasi dan S1nya kita perbandingannya kalau vokasi itu 60 persen itu adalah tentang praktek
lapangan, 40 persen itu adalah teori, S1 baru kebalikan daripada itu, dan S2 kita itu mengarah kepada
S2 terapan dan karena memang kita dimungkinkan untuk menerapkan doktor terapan, S2 terapan dan
S1 terapan. Demikian dengan profesi dan barangkali IPDN barangkali telah lengkap bisa mendidik
vokasi, profesi kemudian akademis, S1, S2, S3 kemudian Diploma IV dan profesi.

Saya kita itu barangkali ...(suara tidak jelas).

IPDN (DR. HIRONI):

Terima kasih Pak Rektor.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Yang terhormat dengan izin Pak Rektor ini adalah kami untuk menjawab beberapa hal terkait
dengan pengalaman permintaan dari MK kepada IPDN khusus kepada saya menjadi saksi ahli terkait
dengan gugatan dari teman saya dari Papua yang mencalonkan calon bupati tetapi dibatalkan oleh
KPU karena dia adalah PNS. Dengan legal standing ini, Bapak/Ibu yang terhormat, bahwa dia
memenuhi syarat untuk menggugat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan Pasal
119 dan 123 seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Amirul bahwa memang posisi PNS sekarang
ini terkait dengan peluang untuk maju dalam Pilkada memang mengalami kesulitan. Mereka baru maju
tetapi harus melepaskan jabatan PNSnya dan ini saya sudah berdebat panjang lebar dengan
menyampaikan dalil-dalil terkait dengan menggugurkan 2 pasal ini dan pada hasil rapat itu masih
dipimpin oleh Ketua MK Pak Hamdan Zoelva sebelum pensiun, semua hakim memandang tidak

ses pembahasan. Janji adalah akan diumumkan pada bulan
itu Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang saya bisa

Gugatan itu dan perwakilan dari pemerintah Menkumham merasa sependapat dengan dalil-dalil yang kita sampaikan. Dan pada kesempatan yang terhormat ini seperti yang disampaikan Pak Amirul tadi kami menyambut baik jika dalam pembahasan rancangan undang-undang atau pergantian dari Perpu Nomor 1 tentang Pilkada bisa mempertimbangkan ketentuan ini bagaimana status keadilan yang sama berlakunya yang sama bagi PNS dengan TNI dan Polri untuk maju menjadi kepala daerah kalau boleh sebelum putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberi ruang yang sama dengan semua anak bangsa untuk maju menjadi calon kepala daerah apabila sudah dilantik baru boleh dia melepaskan status PNS. Sepanjang dia maju menjadi calon kepala daerah, masih belum memiliki kekuatan hukum tetap kalau bisa diberi cuti diluar tanggungan negara, itu mungkin lebih mencapai asas keadilan yang saya sudah berdebat di MK dan MK memandang mempertimbangkan serius tentang hal ini, itu yang pertama perlu saya sampaikan untuk menjawab pandangan dari Pak Amirul tadi.

Yang kedua, Bapak dan Ibu yang terhormat, terkait dengan posisi IPDN dari segi organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sementara membahas tentang struktur organisasi kementerian pasca Perpres 163 karena Kemdagri juga termasuk kementerian yang nomenkturnya diubah. Terkait dengan itu status IPDN sudah kami sampaikan saya diutus oleh Pak Rektor untuk hadir dalam tim untuk mendudukan posisi IPDN tidak saja betul Pak Anggota Dewan tadi yang sudah menyampaikan tidak hanya status sama dengan badan balai-balai di daerah menjadi status UPT tapi tim sudah memandang perlu status IPDN ini diposisikan didalam lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai unit yang melaksanakan urusan pendidikan atau Pamong Praja. Ini sudah diterima oleh tim sambil menunggu ini sudah berproses ke Setneg menunggu Perpres akan turun.

Demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami tambahkan.

Pak Rektor, terima kasih.

REKTOR IPDN:

Terima kasih.

Beberapa hal sedikit saya tambahkan secara ringkas, pertama, Pak Mangindaan pengawasan diluar kampus itu kita bekerja sama dengan seluruh alumni. Jadi beberapa pelanggaran diluar itu kita dapatkan dari alumni dan itu pulang langsung kita proses. Jadi Insya Allah sekarang alumni semua mempunyai handphone rektor. Jadi kalau ada pelanggaran di Yogyakarta, itu alumni yang memberitahu kita. Jadi Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian pengawasan diluar cukup ketat.

Lalu lelang jabatan, Bapak-bapak, pada saat Pak Jokowi melelang jabatan di DKI itu terbaik untuk camat adalah alumni IPDN, lalu beliau diangkat jadi asisten. Kemudian peserta alumni lelang jabatan terbaik lurah itu juga alumni APDN cuma tidak diekspos, yang diekspos itu yang kepala Puskesmas jadi camat kan itu aneh, kepala Puskesmas dilelang camat menang dia itu aneh, tapi yang camat melalui APDN ya wajar saja memang ilmunya itu. Jadi dia yang juara I itu dari alumni kita lelang jabatan. Jadi adanya lelang jabatan saya pikir itu memacu kami semua di kampus untuk semakin mengelola kampus ini dengan baik.

Soal ESQ, Bapak dari PKB, kami sudah 2 tahun bekerja sama dengan Pak Ari Ginanjar, karena kita menyadari betul bahwa pembentukan suatu organisasi itu dibutuhkan kepemimpinan kemudian sistem yang baik dan sistem nilai yang ada dalam organisasi itu. Sistem nilai-nilai inilah yang kita bangun dengan ESQ, Insya Allah itu sudah mulai kita terapkan, karena itu didalam pola pengasuhan kita ada yang kita sebut dengan humanis tadi penjabarannya termasuk seperti itu.

ta sepakat bahwa kita memang tidak beranjak daripada ilmu ilmu dimulai dari filsafat dan berakhir pada seni, karena itulah karena ada bedanya dengan beberapa program yang lain.

Saya rasa demikian Bapak Ketua, saya yakin belum dapat memuaskan semuanya tapi nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita dalam lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Rektor IPDN dan jajarannya. Hadirin dari Pembantu Rektor II sama Bidang Akademis I dan II sudah menyampaikan beberapa hal dengan harapan yang satu tadi dipaparkan oleh Pak Rektor tentu juga nanti disampaikan.

Dan yang kedua, jika ada dari catatan yang ada belum terjawab secara lengkap, kami diharapkan untuk dikirimkan kembali ke Komisi II biar lengkap.

Oleh karenanya rapat hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Komisi II DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional khususnya di bidang pengawasan akan terus menerus mengevaluasi dan menyampaikan saran terhadap pengembangan IPDN baik dari sisi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, pengasuh disini ya sudah namanya pengasuhan tanpa kekerasan dan pengawasan yang baik, jadi itu komitmen Komisi II. Ini spesial buat IPD, kita setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kedua, Komisi II DPR RI mendukung untuk dijabarkan secara terencana, sistematis di bidang pengajaran ini, pelatihan dan pengasuhan dalam mengembangkan pendidikan kepomongprajaan dengan sistem tri tunggal yang terpusat sekaligus IPDN disini sebagai laboratorium revolusi mental di bidang birokrasi pemerintahan. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Sebab ada tadi kesimpulan usulan dari Saudara Yanuar dan PKB ya maunya tamat IPDN itu alumnyanya bisa baca doa, jangan membaca doa untuk sendiri saja tapi ya hal budaya harus nanti lebih kita dalam.

Yang ketiga, Komisi II DPR RI mendukung adanya penjaminan mutu di IPDN, mulai dari proses awal sampai kepada alumnyanya. Penataan struktur jabatan fungsional, pola karir alumni sekaligus untuk meningkatkan dan mendapatkan akreditasi yang lebih baik dan menata posisi, ini jangan STPDN lagi, IPDN dengan memperbaiki Permendagri Nomor 41 Tahun 2010, pas ini ya? Dengan memperbaiki dan harus ada apa bentuknya Perpres nanti, itu ya Perpres yang lebih jelas posisinya begitu. Ini kita simpulkan, setuju ya Saudara-saudara?

(RAPAT : SETUJU)

Ya. Yang keempat, Komisi II DPR RI sepakat agar akreditasi IPDN dapat ditingkatkan ke akreditasi A dalam semua program studinya dan sepakat agar dibangun ruang-ruang perpustakaan di setiap tingkatan fakultas yang ada. Jadi kalau 2 fakultas tadi, nama ini pun ya perlu nanti juga dikaji oleh senat guru besar IPDN, Fakultas Politik Pemerintahan, jadi Fakultas Politik Pemerintahan, padahal kalau di Universitas Sahid, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ada Fakultas Manajemen Pemerintahan, mungkin prodi-prodinya agar kita juga disampaikan prodi-prodi yang ada itu 10 prodi kira-kira dimana bentuk relevansinya? Jadi ruang-ruang perpustakaan kita setuju di setiap tingkatan dan fakultas ada serta segera dilaksanakan pola peningkatan SDM tenaga pendidikan agar menjadi yang terhandal,

au yang pengasuhnya tenaga pendidikan dan pengajarannya
Agar dibangun lah, dibangunkan ya seperti yang tidur

(RAPAT : SETUJU)

Yang kelima, Komisi II DPR RI meminta kepada IPDN agar pola dalam rekrutmen calon, itu tadi termasuk Pak Mangindaan dan yang lain, siswa harus direncanakan dengan baik. Jadi seperti tahapannya ini juga dilakukan sistem gugur begitu. Jadi ini membuat ketar-ketir juga calon IPDN, ya kalau memang tidak sehat ya itu kan terbukti dari dokter, tidak sehat, tidak cocok jadi calon camat, calon pamong begitu tidak sehat, ada larangan yang tidak bisa dipenuhi ya sudah itu, tetapi jangan baru awal baris berbaris ya orang sudah digugurkan. Jadi harus direncanakan dengan baik yang bersih, jangan ada gertak-gertakan, jadi bersih maksudnya disitu, yang bersih jauh dari segala bentuk yang berbasis KKN dan premanisme bagi calon intelektual yang akan lulus. Ini kira-kira begini kita jabarkanlah secara baik begitu soal ini. Jadi kalau kami singgung tadi bahwa ada harus dari psikologi Angkatan Darat atau dari mana lah teknisnya, jangan kita ajak misalnya membuat kita suasana yang tidak baik IPDN dalam mempersiapkan ini adalah harus juga secara baik. Oleh karenanya inilah kesimpulan kita. Saya kira keputusan Komisi II oh ini kita setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Kita lanjutkan nanti kunjungan tapi tidak usah ada dalam kesimpulan Komisi II DPR RI dalam masa sidang ini, mengambil waktu yang pas nanti hari Sabtu supaya sempurna, begitu Pak Sukiman mengajukan ini, hari Sabtu dan Minggu. Jadi kami konfirmasi Pimpinan kepada Pak Rektor, kalau Sabtu dan Minggu bisa pulang Minggu sore tidak? Oh bisa, hari Minggu bisa kumpul tidak di tempat tertentu? Rektor tadi mengatakan bisa. Oleh karena itu di 3 tempat nanti akan kita koordinasikan dari sekretariat dan Komisi II DPR RI yang jumlahnya 50 akan membagi 3 tempat ya kalau misalnya mau ke Jatinangor ya ke Jatinangor, yang mau ke Pontianak ya Pontianak belum beres, nanti akan kita, ya kalau Papua cocok, Papua agar sekiranya untuk kita lihat agar kita lihat lebih tuntas.

Saya kira demikian Saudara-saudara rapat dengar pendapat kita pada hari ini, mudah-mudahan jangan lagi UPT Pak, jangan lagi UPT sebab ya mantan rektor juga tadi berbicara kalau UPT sifatnya ya itu kita agak ragu-ragu. Jadi kesepakatan pertama tadi, Komisi II tidak ragu-ragu dengan IPDN tapi dengan catatan konsisten untuk kita penuhi.

Terima kasih atas kehadiran kita semua di sini, Saudara Rektor IPDN, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Dengar Pendapat dengan Rektor IPDN dan jajarannya dengan ini ditutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)

**Jakarta, 27 Februari 2015
Ketua Rapat**

ttd

**Rambe Kamarul Zaman
A-236**